

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) DINAS SOSIAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

**SIMAH REZEKI. R**

**2101046035**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Simah Rezeki. R

NIM : 2101046035

Fak./Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/PMI

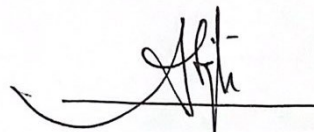
Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita  
(BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 November 2024

Pembimbing



**Dr. Abdul Ghoni, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 19770709 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI  
SOSIAL WANITA (BPSRW) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

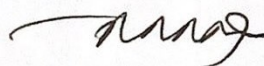
**SIMAH REZEKI, R**

**2101046035**

telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
pada tanggal 20 Desember 2024 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
guna memperoleh gelas Sarjana Sosial (S.Sos)

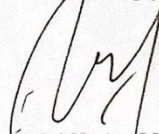
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I



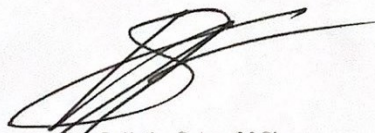
Dr. Agus Rivadi, S.Sos., M.Si.  
NIP. 198008162007101003

Sekretaris Penguji II




Abdul Karim, M.Si.  
NIP. 19881019 201903 1 013

Penguji III



Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197002021998031005

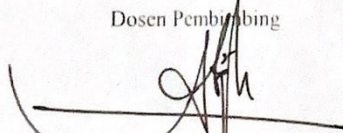
Penguji IV



Asep Firmansyah, M.Pd.  
NIP. 199005272020121003

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Dr. Abdul Ghoni, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197707092005011003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Desember 2024



Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.  
NIP. 197205171998031003

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simah Rezeki. R  
NIM : 2101046035  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 Desember 2024

Peneliti



Simah Rezeki. R

2101046035

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, *Assalamu 'alaikum Wr Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur tidak terhitung atas kehadiran Allah SWT dengan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pemberdayaan Perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang suri tauladan Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diterangi oleh iman dan islam.

Setelah melalui beberapa proses yang tidak sebentar, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan yang didapatkan pada skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi tidak lepas dari dukungan, arahan, dorongan, dan semangat dari pihak yang telah membantu.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk kalangan generasi selanjutnya, menjadikan skripsi ini referensi dalam membantu tugas kalian. Terlepas dari segala keraguan, peneliti mengaku telah melibatkan banyak bantuan dari pihak yang ikt serta dalam pembuatan proses skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh Fauzi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Agus Riyadi S.Sos., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Abdul Karim, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan izin penelitian.
4. Dr. Abdul Ghoni, S.Ag, M.Ag, selaku wali studi dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, bimbingan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik penulis dalam berbagai aspek keilmuan dan keperluan administrasi.
6. Kedua orang tua saya Bapak Rahmaddi dan Ibu Kurnia Ilahi yang selalu mendoakan saya disetiap ibadahnya, memberikan semangat, dukungan, nasihat serta dorongan untuk

mengerjakan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

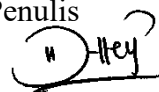
7. Abang, kakak, dan kakak ipar penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini demi membahagiakan orang tua kami.
8. Bapak Widiyanto, S.Sos., MP selaku Kepala BPRSW dan Ibu Herawati, A.KS. selaku Kepala Pekerja Sosial dan seluruh tenaga kerja di BPRSW yang telah mengizinkan serta membantu penulis untuk melaksanakan penggalian data dalam penelitian ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang, khususnya keluarga PMI A angkatan 2021 yang telah membantu, menemani selama perkuliahan, senang bisa mengenal kalian dengan berbagai kisah, cerita, dan pengalaman yang tak terlupakan.
10. Keluarga besar UKM KORDAIS yang telah memberikan pengalaman dan kesempatan yang sangat luar biasa di bidang Sekretaris.
11. Keluarga Besar Mahasiswa Aceh dan Keluarga Besar Mahasiswa Sumatera Utara yang telah memberikan semangat dan sudah menjadi rumah kembali bagi penulis.
12. Kelompok KKN MIT Tematik ke-18 tahun 2024 yang telah memberikan cerita dan pengalaman baru dalam melakukan pengabdian di masyarakat khususnya di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
13. Serta semua pihak dan informan yang ikhlas dalam membantu, memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Semoga segala amal, bantuan dan kebaikan dari berbagai pihak di atas dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal dan melimpah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Aamiin yarabbal ‘alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Semarang, 11 November 2024

Penulis



**Simah Rezeki. R**

**NIM. 2101046035**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk  
Ayahanda Rahmaddi dan Ibunda Kurnia Ilahi

Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang, nasihat, bimbingan, arahan dan dukungan kuat sehingga menjadi motivasi dan semangat yang selalu mengiringi langkah saya dalam menjalani kehidupan serta mencari ilmu. Ayah ibu, terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas segala yang engkau berikan. Semoga Allah selalu memberikan anugerah tanpa batas atas segala pengorbanan dan jasa yang Ayah Ibu berikan.

## MOTTO

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

“Dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi”

(QS. Al-Fath: 28) (Departemen Agama RI, 2020)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	7
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	10
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
b. Definisi Konseptual.....	10
c. Sumber dan Jenis Data.....	11
d. Teknik Pengumpulan Data.....	12
e. Teknik Keabsahan Data.....	13
f. Teknik Analisis Data.....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	16
<b>A. Konsep Pemberdayaan Perempuan</b> .....	16
1) Definisi Pemberdayaan Perempuan.....	16
2) Tujuan Pemberdayaan Perempuan.....	20
3) Metode Pemberdayaan Perempuan.....	22
<b>B. Konsep Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial</b> .....	25
<b>BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b> .....	31

<b>A. Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>31</b>
1. Letak Geografis BPRSW .....	31
2. Sejarah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta .	32
3. Visi, Misi, dan Tujuan BPRSW .....	32
4. Struktur Organisasi BPRSW .....	33
5. Sarana dan Prasarana.....	34
6. Masalah Sosial yang Dihadapi Perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta.....	36
<b>B. Proses Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istiewa Yogyakarta .....</b>	<b>43</b>
a. Tahapan dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta.....	44
b. Metode Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta.....	61
c. Materi Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta.....	63
<b>C. Hasil Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Analisis Proses Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta .....</b>	<b>68</b>
a. Analisa Tahapan dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta	70
b. Analisa Metode dan Teknik Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta ...	76
c. Analisa Materi Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta.....	77
<b>B. Analisis Hasil Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>C. Kata Penutup.....</b>	<b>83</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>84</b>
<b>Lampiran 1 .....</b>	<b>88</b>
<b>Lampiran 2 .....</b>	<b>105</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>107</b>

## **Daftar Gambar**

Gambar 3.1 Peta Lokasi BPRSW Yogyakarta.....	31
Gambar 3.2 Ruang Keterampilan Menjahit.....	52
Gambar 3.3 Hasil Karya Klien.....	52
Gambar 3.4 Ruang Keterampilan Salon.....	53
Gambar 3.5 Hasil Karya Klien.....	54
Gambar 3.6 Ruang Keterampilan Olah Pangan.....	55
Gambar 3.7 Hasil Karya Klien.....	56
Gambar 3.8 Ruang Keterampilan Mambatik .....	57
Gambar 3.9 Hasil Karya Klien.....	57

## **Daftar Tabel**

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BPRSW Yogyakarta.....	33
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana BPRSW Yogyakarta.....	35

## ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan merupakan peningkatan kesadaran dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan mereka terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan tindakan transformatif. Hal ini penting dalam rangka mengurai persoalan kemiskinan dan ketimpangan-ketimpangan lain yang menimpa diri mereka. Merespon tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan, maka di Yogyakarta muncul beberapa lembaga advokasi terhadap perempuan. Salah satu lembaga yang tergabung dalam pemberdayaan terhadap perempuan di Yogyakarta adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta merupakan lembaga yang menangani masalah perempuan, mereka dirawat, dibina, dan dilayani hingga mereka pulih dari masalah yang mereka alami.

Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana proses pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Bagaimana hasil pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan fakta atau data bahwa proses pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta terdiri dari beberapa tahapan, metode pemberdayaan, dan materi pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. Tahap pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta meliputi (1) Tahap Sosialisasi, Penjangkauan dan Penerimaan Klien (2) Tahap Rehabilitasi Sosial (3) Tahap Resosialisasi (4) Tahap Bimbingan Lanjut (5) Tahap Terminasi. Program pemberdayaan ini berhasil meningkatkan semangat klien sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan serta mendorong klien untuk berwirausaha dan mempermudah klien dalam mencari lapangan pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Meningkatkan rasa percaya diri klien untuk bersosialisasi di masyarakat, membuat diri klien menjadi berdaya dan melupakan masalah yang menimpa mereka.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, dan BPRSW Yogyakarta.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya manusia sering disebut sebagai makhluk sosial karena mereka tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari individu lain untuk memenuhi perluasan hidup mereka. Seseorang akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk hidup dalam kesejahteraan. Kesejahteraan sosial yaitu ketika semua kebutuhan manusia secara fisik, rohani, dan sosial terpenuhi. Hanya saja ketika masalah sosial dapat diatasi dengan baik, kesejahteraan sosial dapat terjadi. Namun, beberapa masalah sosial masih menyelimuti kehidupan masyarakat, yang menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu hidup sejahtera (Yuli, 2018). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 24 Ayat 1 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan pihak swasta atau masyarakat. Dalam arti peluang serta peran pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat (Anwar, 2022).

Perempuan merupakan kelompok marginal dalam masyarakat yang seringkali diabaikan dan didiskriminasi. Banyak dibidang kehidupan, kebutuhan dan kepentingan perempuan masih belum sepenuhnya diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Tindakan diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi secara spontan. Perbedaan gender dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau budaya baik melalui ajaran agama maupun kebijakan negara (Barus, 2015). Namun perjuangan kesetaraan gender tidak akan berhasil jika kita hanya fokus pada perubahan politik. Tantangan terbesarnya terletak pada perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan masih mempunyai tanggung jawab rumah tangga (domestic) (Barus, 2015).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah strategi perubahan sosial yang dirancang untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat diberi kesempatan untuk belajar agar dapat secara mandiri meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan harus dilakukan dengan partisipasi

aktif masyarakat secara bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan (Sumarno, 2015). Payne mengartikan pemberdayaan sebagai kemampuan masyarakat untuk memperoleh kekuasaan atau wewenang dalam mengambil keputusan dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil, seperti mengurangi dampak hambatan pribadi dan sosial terhadap pelaksanaannya (Sumarno, 2015). Daulay mengungkapkan, program pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Berbagai upaya pemberdayaan perempuan dinilai telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek seiring perkembangannya. Upaya tersebut meliputi peningkatan status, kondisi, dan kualitas hidup perempuan di sejumlah bidang penting, termasuk pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keterlibatan dalam program keluarga berencana (KB) (Sumarno, 2015).

Prinsip pemberdayaan bertujuan untuk menjadikan warga berdaya dan mempertinggi tingkat hidupnya. Pemberdayaan yang berhasil akan membentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal (Mardikanto, 2015). Faktor internal berdasarkan penerima efikasi diri yg tinggi, sedangkan faktor eksternal berdasarkan dukungan sosial (budaya patriarki warga). Pemberdayaan warga yang berhasil bisa dicermati berdasarkan kapasitas ekonomi, kemampuan mengakses layanan sosial, dan kapasitas budaya dan politik (Mardikanto, 2015).

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut data dari Bapedda Jogjaprov, jumlah PMKS terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah PMKS di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 102.746 dan meningkat lagi pada tahun 2022 mencapai 107.798 orang. Salah satu PMKS dengan jumlah tertinggi adalah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), yang meningkat dari 12.405 orang menjadi 12.454 orang. Menurut Permensos RI No. 08/2012, Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah, atau janda yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti yg dikatakan As-Sayid Sabiq bahwa kebutuhan biologis manusia adalah insting yg paling kuat, karenanya perlu disalurkan menggunakan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan adalah

salah satu cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, dan melalui pernikahan, jiwa seorang bisa menjadi hening dan stabil secara mental, sebagai akibatnya menumbuhkan rasa cinta antara pasangan dan keturunannya (Maula, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan di daerah Yogyakarta cukup memprihatinkan dan tidak terlepas dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Kepala Dinas P3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi, kasus kekerasan di DIY pada tahun 2023 menurun pada orang dewasa, tetapi meningkat pada anak, dengan 773 orang dewasa dan 414 anak. Mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada anak perempuan berusia 11-17 tahun. Korban kekerasan yang tercatat sebagian besar belum menikah atau tidak bekerja, ini termasuk pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga (DP3AP2 DIY, 2024). Pelaku kekerasan tersebut mayoritas adalah orang terdekat korban. Contoh hubungan mereka dengan korban dapat mencakup pasangan suami/istri, orang tua keluarga, pacar, teman, atau yang lainnya. Semua pelaku kekerasan ini sudah terdata secara rinci oleh pihak balai sehingga mudah untuk ditindaklanjuti dengan pihak kepolisian (DP3AP2 DIY, 2024).

Upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan di DIY Ketua FPKK DIY mengatakan bahwa penyebab kekerasan suami-istri dan kekerasan terhadap anak harus diidentifikasi dan pelaku dihukum. Oleh karena itu, hukum Islam sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab. Hukum hadir untuk menegakkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Keberadaan hukum sangat penting untuk mengatur berbagai kepentingan yang muncul dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum berfungsi sebagai aturan atau norma sosial yang secara tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Soerjono Soekanto dikutip oleh Ghoni et al, 2020). Sebagaimana yang tertera dalam beberapa ayat, kewajiban untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Al-Mu'minin (23): 52).

وَأَنَّ هُدًى أُمَّتِكُمْ أَهْلَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya: Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.

Kewajiban setiap orang untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan (An-Nisaa (4): 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selain itu, kewajiban untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak melihat jenis kelamin (as-Syuura (42):15).

فَإِذْ لَكَ فَادْحٌ ۗ وَأَسْتَقِيمٌ ۗ كَمَا أُمِرْتُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَأْأَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya cukup jika memberikan pelatihan saja, namun, setelah pelatihan selesai, harus ada tindak lanjut berupa kegiatan nyata yang dilakukan secara bertahap dan konsisten. Jika tindak lanjut ini disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan, maka akan lebih berhasil. Pendampingan ini membutuhkan agen pemberdayaan yang berperan sebagai tokoh masyarakat, komunikator, penggerak, dan fasilitator di lapangan, bukan hanya instruktur (Sumarno, 2015).

Organisasi sosial yang berperan dalam pengelolaan dan perencanaan kesejahteraan sosial telah berkembang karena tuntutan masyarakat semakin rumit dari waktu ke waktu. Organisasi-organisasi sosial yang ada di Indonesia memiliki sumbangsih dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Yogyakarta adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. BPRSW bertanggung jawab untuk memberikan pemberdayaan, layanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam balai rehabilitasi sosial ini para klien yg sudah konseling akan menerima

rehabilitasi. Mereka dirawat, dibina, dan dilayani guna untuk membantu mereka sembuh dari kasus yang mereka alami. Ada beberapa contoh pemberdayaan dan rehabilitasi yg dilakukan BPRSW antara lain bimbingan fisik, mental, sosial, dan bimbingan keterampilan (Surianti, 2023).

Pendampingan konseling individual di BPRSW, khususnya bagi konseli yang menderita disfungsi sosial, diharapkan dapat membantu konseli pulih dari masalah kesehatan mental yang mereka alami dan memungkinkan mereka kembali ke masyarakat dengan dapat mengembangkan potensi mereka punya. (Arum, 2023). Hal ini ditandai dengan meningkatnya pengetahuan, munculnya kepercayaan dan keyakinan terhadap perubahan diri mereka, serta kesadaran sasaran untuk memiliki tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri. Dengan demikian, program kesejahteraan sosial dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dalam setiap pelaksanaannya (Admin pekerja sosial BRSPA DIY, 2019). Ada berbagai pengalaman yang telah dilewati oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / klien selama menjalankan usahanya selepas dari BPRSW Yogyakarta. Seperti klien yang berinisial FE menggeluti dunia salon dengan spesifikasi merias reog, ternyata usaha tersebut membawanya pada kesejahteraan keluarganya (Admin pekerja sosial BRSPA DIY, 2019).

Peneliti melihat bahwa banyak perempuan saat ini belum mencapai tingkat kesejahteraan, yang membuat pemberdayaan perempuan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Peneliti memilih Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu tempat yang menyediakan penanganan bagi perempuan di Yogyakarta serta pelaksana teknis layanan di bidang pemberdayaan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, perempuan yang berisiko secara sosial ekonomi, perempuan yang menjadi pelacur, perempuan yang pernah mengalami kekerasan, perempuan pekerja migran yang memiliki masalah sosial, perempuan yang pernah menjadi korban perdagangan manusia. BPRSW Yogyakarta juga cukup responsif dalam memberikan layanan kepada wanita. Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji secara lebih mendalam tentang **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN**

## **REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana hasil dari pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian memberikan gambaran arah penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberdayakan perempuan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah beberapa manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah pengembangan masyarakat dibidang pemberdayaan terhadap perempuan yang mengalami keluhan atau masalah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui proses pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hasil dari program pemberdayaan ini dapat meningkatkan keterampilan klien dan mendorong mereka untuk berwirausaha. Meningkatkan rasa percaya diri klien untuk bersosialisasi di

masyarakat, dan mempermudah klien dalam mencari lapangan pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan judul penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain terkait penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penulis, namun penulis telah mengutip beberapa karya tulis yang dijadikan acuan untuk memperkaya bahan dalam penelitian penulis.

Berikut beberapa kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya:

*Pertama*, Khabib Al Abbasy (2021), “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Batik Tulis (Studi Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Basmala Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil pemberdayaan perempuan di PKBM Basmala, Desa Tambakan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu, aspek pendidikan. Aspek pendidikan bertujuan untuk meningkatkan produksi batik tulis dengan mengikuti pelatihan pewarnaan batik dan pengembangan motif. Aspek kedua adalah unsur politik yang memberikan ruang bagi anggota perempuan PKBM Basmala untuk membentuk kelompok usaha sendiri di bidang batik tulis. Ketiga, dari segi status sosial, perempuan Desa Tambakan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki karena lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada penghasilan suami. Persamaan penelitian Khabib Al Abbasy dengan peneliti yaitu terletak pada proses pemberdayaan perempuan. Perbedaannya, dalam skripsi Khabib Al Abbasy membahas tentang pemberdayaan perempuan melalui program Batik Tulis sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan perempuan di BPRSW Dinas Sosial DIY.

*Kedua*, Sri Handayani (2019), “Strategi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dalam Bertahan Hidup di Kabupaten Sleman”, merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi PRSE dalam bertahan hidup, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pendekatan PRSE

untuk bertahan hidup. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu strategi wanita rawan sosial ekonomi dapat bertahan hidup dapat dilihat berdasarkan beberapa cara pemberdayaan, pertama menggunakan melakukan *assessment* terhadap klien secara individual, kedua membangun kelompok PRSE supaya sanggup berorganisasi dan bekerjasama, ketiga membentuk aktivitas yang sinkron sesuai kebutuhan klien.

Persamaan penelitian Sri Handayani dengan peneliti yaitu terletak pada proses pemberdayaan perempuan. Perbedaannya, dalam tesis Sri Handayani membahas tentang strategi perempuan rawan sosial ekonomi dalam bertahan hidup sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan perempuan di BPRSW Dinas Sosial DIY.

*Ketiga*, Erna Ermawati Chotim (2020), “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi terhadap UKM Cirebon Home Made)” menggunakan metode kualitatif yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan sumber data sekunder, penelitian ini menilai tingkat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui tiga indikator utama yaitu, pendidikan dasar, menengah dan tinggi, lapangan kerja dan partisipasi orang dalam pengambilan kebijakan. Studi ini menemukan bahwa Cirebon *Home Made* adalah contoh bisnis sukses milik perempuan yang menciptakan suasana ramah gender. Meskipun terdapat tantangan dalam menyediakan statistik yang akurat dan dapat diandalkan mengenai kemajuan dalam tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, statistik dan bukti yang tersedia menunjukkan bahwa target pada tahun 2020 sudah sangat tidak memadai. Namun, pemerintah di semua tingkatan perlu meningkatkan upaya kemitraan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia untuk mencapai kemajuan yang berarti secara bertahap. Persamaan penelitian Erna Ermawati Chotim dengan peneliti yaitu terletak pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Perbedaannya, dalam jurnal Erna Ermawati Chotim membahas tentang aktualisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada keinginan dan keniscayaan pendekatan pragmatis sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan perempuan di BPRSW Dinas Sosial DIY.

*Keempat*, Ine Namira (2023), “Pemberdayaan Perempuan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah akses perempuan dalam pemberdayaan melalui PKK Kalurahan Caturtunggal sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari program PKK Kalurahan Caturtunggal yang telah terlaksana. Keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan PKK Kalurahan dinilai cukup tinggi, dan keberhasilan PKK Kalurahan Caturtunggal ditunjukkan dengan keikutsertaan mereka. Persamaan penelitian Ine Namira dengan peneliti yaitu terletak pada pemberdayaan perempuan. Perbedaannya, dalam skripsi Ine Namira membahas tentang pemberdayaan perempuan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan peneliti membahas pemberdayaan perempuan di BPRSW Dinas Sosial DIY.

*Kelima*, Hariyanto Saputra (2020), “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) (Studi Pada Kelompok PKK Di Kelurahan Lorok Pakjo Palembang)”, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan dalam pemberdayaan perempuan melalui program UP2K di Kelurahan Lorok Pakjo Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program UP2K ditemukan berupa tahap pengembangan (*enabling*), tahap memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian dan hambatan pada proses pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Persamaan penelitian Hariyanto Saputra dengan peneliti yaitu terletak pada pemberdayaan perempuan. Perbedaannya, dalam skripsi Hariyanto Saputra membahas tentang pemberdayaan perempuan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Lorok Pakjo Palembang sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan perempuan di BPRSW Dinas Sosial DIY.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya untuk mendapatkan, menguraikan, dan mengkaji fakta serta bukti yang dimiliki penulis dalam rangka melakukan penelitian. Bentuk pengkajian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berpusat pada pengamatan yang mendalam, dapat menghasilkan studi tentang fenomena yang lebih komprehensif. Di mana penelitian kualitatif mengkaji masalah individu dan sosial, penulis menyampaikan hasilnya menggunakan data lapangan dan analisis data dimasukkan ke dalam laporan observasi yang terinci (Creswell, 2007). Penelitian kualitatif berfokus pada elemen manusia, objek, institusi, serta hubungan dan interaksi antar elemen-elemen tersebut untuk memahami peristiwa, tindakan, dan fenomena (Mohamed dkk, 2010).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan gejala yang dialami individu maupun kelompok tertentu (Koentjaraningrat, 1993). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan tentang bentuk pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **b. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah batasan pemahaman yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap suatu variabel atau konsep yang menjadi objek pengukuran. penyelidikan, atau ekstraksi data (Hamidi, 2010: 141). Definisi konseptual mengenai subjek penelitian ini disusun untuk memahami dan menganalisis berbagai teori dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat daya atau kemampuan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

perdagangan manusia (*human trafficking*), dan kemiskinan. Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang diharapkan dari transformasi atau perubahan sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki kewenangan dan pengetahuan serta kemampuan untuk mendukung kebutuhan fisik, finansial, dan sosial. Hal ini mencakup rasa percaya diri, kapasitas untuk menyatakan tujuan, pekerjaan, interaksi sosial, dan kemandirian dalam melakukan tugas sehari-hari (Suharto 2014: 59-60).

Berkaitan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan adalah kegiatan pemberdayaan perempuan yang difasilitasi oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) dibawah naungan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

## **2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)**

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Yogyakarta (BPRSW) merupakan unit pelaksana teknis daerah pelayanan sosial yang mempunyai misi untuk mengatasi permasalahan perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRSW Yogyakarta didirikan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta merupakan organisasi publik yang membantu perempuan bermasalah sosial dengan menawarkan keselamatan, layanan, dan rehabilitasi. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan perempuan penderita masalah sosial mulai dari tahap kontak pertama hingga tahap terminasi (Dinas Masyarakat Khusus Yogyakarta, 2018).

### **c. Sumber dan Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data yg diperoleh seseorang peneliti berdasarkan sumbernya tanpa mediator pihak lain atau penelitian langsung berdasarkan objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah individu maupun kelompok

(Suteki & Tufani, 2018: 214). Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, atau tanya jawab langsung kepada informan tentang program pemberdayaan bagi klien. Data primer ini diperoleh dari BPRSW Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melalui wawancara. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/klien yang ada di balai tersebut yang telah mendapatkan pemberdayaan serta pendampingan dari BPRSW Yogyakarta.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data yang peneliti peroleh tidak dari sumbernya (objek penelitian) namun melalui sumber lain (ibid, 125). Data sekunder diperoleh dari informasi dokumenter berupa arsip, buku, jurnal akademik, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain (Azwar, 1998). Sumber data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mencari berbagai artikel, jurnal, buku, hasil penelitian serta penulisan-penulisan yang berkaitan dengan persoalan pengkajian.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu prosedur dan taktik yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan hasil penelitian adalah penggunaan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meneliti penelitian ini.

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian oleh peneliti. Untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan relevan bagi penelitian, pendekatan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati semua aspek lokasi, korban, aktivitas, waktu, peristiwa, tujuan, dan lain-lain (Purhantara, 2010: 87). Pada penelitian ini dilakukan observasi secara langsung di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengikuti beberapa program yang sudah ada di balai tersebut. Observasi tahap pertama yaitu dengan memperkenalkan lingkungan balai dilanjutkan dengan struktur ketenagakerjaan di balai. Observasi tahap kedua yaitu menggali tentang beberapa pertanyaan yang ada di pedoman wawancara. Peneliti

dapat mengumpulkan data yang lebih tepat, dapat dipercaya, dan sah untuk mendukung temuan peneliti berkat pengamatan ini, seperti proses pemberdayaan perempuan di BPRSW dan hasil dari proses pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan antara narasumber yang dipilih dengan pewawancara (Herdiansyah, 2010: 9). Wawancara memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan orang-orang dalam suatu komunitas atau masyarakat. (Koentjaraningrat, 1983). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan terstruktur. Untuk informan berjumlah sebanyak 7 orang dengan rincian Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial DIY, pekerja sosial, dan beberapa klien yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) tersebut.

## 3. Dokumentasi

Menurut Moleong yang dikutip oleh Herdiansyah, dokumentasi dapat memanfaatkan dua jenis dokumen. Pertama, catatan pribadi, seperti tulisan atau catatan seseorang yang memuat pengalaman, perilaku, dan pendapatnya. Kedua, bahan resmi, yang terbagi menjadi dua kategori, dokumen eksternal, seperti majalah, surat kabar, dan deklarasi, dan dokumen internal, seperti anggaran dan memo lembaga (Herdiansyah, 2010: 9). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, termasuk foto kegiatan pemberdayaan, keterangan atau catatan dari beberapa kasus korban yang tersedia didalam arsip balai, data struktur organisasi, dan standar pelayanan. Catatan dan arsip ini dapat digunakan untuk mendukung informasi.

### e. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan validasi data yang dikumpulkan di lapangan melalui prosedur (Moleong, 2017: 321). Pengujian validitas data dalam penelitian ini melibatkan penentuan seberapa akurat pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Uji

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007: 270).

Uji credibility data penelitian yang disampaikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan dapat dianggap telah dilakukan sebagai penelitian ilmiah. Salah satu uji credibility yang digunakan peneliti adalah menggunakan triangulasi. William Wiersma menjelaskan triangulasi dalam pengujian credibility diartikan sebagai pengumpulan informasi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan triangulasi sumber informasi, teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007: 273). Sedangkan triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik pengumpulan data, karena dengan menggunakan triangulasi ini sudah mencakup seluruh teknik pengambilan data yang ada dalam penelitian ini.

Triangulasi teknik pengumpulan data bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda yakni melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan berbagai metode untuk menentukan kebenaran data dari satu sumber, teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode. Dalam hal ini, peneliti dapat menggabungkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi satu metode untuk mencapai suatu kesimpulan, dengan memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. (Sugiyono, 2013b). Triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama, dengan menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan (Sugiyono, 2013b).

#### **f. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan temuan penelitian yang terkumpul, peneliti melakukan analisis dan pembahasan secara deskriptif. Hal ini melibatkan penggunaan data berupa informasi, menjelaskannya dalam bentuk prosa, dan menghubungkannya dengan data lain untuk memperoleh kejelasan dari data tersebut. Oleh karena itu, bentuk analisis penelitian ini dilakukan melalui deskripsi, bukan dalam bentuk angka statistik atau

bentuk angka lainnya (Subakyo 2006: 106). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi akan ditulis dalam catatan lapangan yang dijadikan sebagai sumber data yang diperoleh.

#### 2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas dan memilih informasi penting, memfokuskan pada hal yang penting, dan mencari pola serta tema. Dengan cara ini, reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan memudahkan pengambilan data saat dibutuhkan. Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan mengenai proses dan hasil pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) Dinas Sosial DIY.

#### 3) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Draf tabel, grafik, dan lainnya dapat digunakan untuk menampilkan data. Penyajian data ini memudahkan dalam memahami data. Penyajian data yang diperoleh dari subjek penelitian ini tentunya membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan peneliti selama proses penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Dinas Sosial (BPRSW) DIY.

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan dan pengujian kesimpulan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan selama penyelidikan yang ditemukan di lapangan. Peneliti kemudian menulis laporan berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan teori dan fakta nyata. Artinya informasi yang diperoleh telah diverifikasi sebagai bagian dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah

penelitian tentang proses dan hasil pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) DIY.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Konsep Pemberdayaan Perempuan**

##### **1) Definisi Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan telah menjadi isu utama dalam pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 dan inisiatif seperti Konferensi Dunia tentang perempuan yang diadakan di Beijing pada tahun 1995 berfokus pada pemberdayaan perempuan (Sugita dkk, 2024). Seperti yang terlihat di Rwanda dan Bangladesh, upaya pemberdayaan perempuan secara signifikan meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Perekonomian Rwanda tumbuh pesat sebagai hasil dari meningkatnya keterlibatan perempuan dalam politik dan dunia kerja. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen negara tersebut mencapai 61,25%, tertinggi di dunia (Bank Dunia, 2021). Sementara itu, di Bangladesh keterlibatan perempuan dalam industri tekstil dan pakaian yang menjadi fondasi ekonomi negara tersebut, telah menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi yang signifikan (Bank Dunia, 2021). Akibatnya, perempuan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi suatu negara ketika mereka diberi akses penuh ke sekolah, pekerjaan, dan sumber daya lainnya (Pahlevi & jauhariyah, 2022).

Menurut Edi Suharto (dikutip dalam Mustafirin, Riyadi dkk, 2021), pemberdayaan adalah keadaan atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial yang disebut masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan, memiliki penghasilan, dan mampu bertindak secara mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan pada hakikatnya upaya untuk terwujudnya lingkungan atau tatanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh daya, sehingga memungkinkan terjadinya pembangunan. Beberapa strategi untuk meningkatkan daya tersebut melalui dorongan, motivasi, dan perhatian terhadap potensi yang dimiliki serta upaya pengembangannya (Ginandjar Kartasasmitha dikutip dalam Mustafirin, Riyadi dkk, 2021). Untuk menjadi lebih berdaya, suatu

masyarakat harus melalui serangkaian proses yang panjang. Proses pemberdayaan cenderung berhubungan dengan unsur pendorong sosial, ekonomi, dan politik.

Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan karena perempuan sering menjadi sasaran ketimpangan ekonomi dan sosial, yang membantu menurunkan angka kemiskinan (Ras, 2013). Peningkatan partisipasi kerja perempuan juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan selain menciptakan lapangan kerja baru (Nuraeni & Suryono, 2021). Menurut Azis, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan. *Pertama*, membantu masyarakat menemukan permasalahannya. *Kedua*, menganalisis permasalahan. *Ketiga*, menentukan skala prioritas permasalahan, yaitu memilih setiap permasalahan yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. *Keempat*, mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi, termasuk melalui pendekatan sosial budaya yang ada di masyarakat. *Kelima*, melakukan tindakan nyata dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi. *Keenam*, melakukan evaluasi terhadap rangkaian dan proses pemberdayaan ini untuk menilai sejauh mana kegagalan dan keberhasilannya (Mustafirin, Riyadi dkk, 2021).

Siti Noor Kodariyah menyatakan dalam disertasi doktornya bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan ditandai dengan hadirnya tiga indikator (Kodariyah, 2015):

- a. Indikator keluaran (*output indicator*) ditandai dengan terselenggarakannya pemberdayaan perempuan.
- b. Indikator hasil (*outcome indicator*) ditandai dengan perempuan yang sudah diberdayakan mampu berupaya menunjang perekonomian sesuai dengan keterampilannya.
- c. Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai dengan perempuan berdaya yang dapat memperoleh penghidupan yang layak, memulai usaha, berorganisasi dan berpartisipasi dalam masyarakat, serta melatih perempuan lain untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Strategi pemberdayaan dikenal dengan konsep pendekatan Gender and Development (GAD). Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan yang

memperhatikan perempuan dalam pembangunan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk semua jenis pekerjaan yang mereka lakukan, baik yang produktif, reproduktif, di ranah privat maupun publik. Pendekatan ini juga menolak segala usaha yang meremehkan pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan keluarga dan rumah tangga (Nugroho, 2008: 137). Partisipasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses pemberdayaan yang mendorong keberhasilannya (Riyadi, dikutip dalam Mustafirin, Riyadi dkk, 2021). Deviyanti berpendapat bahwa partisipasi mendorong seseorang untuk mau berpartisipasi atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan (Mustafirin, Riyadi dkk, 2021). Pemberdayaan merupakan strategi penting untuk meningkatkan peran dan peluang perempuan dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka, serta menjadi upaya untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi diri agar lebih mandiri dan produktif. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan keterampilan, terutama dalam konteks penelitian ini.

Dasar perbedaan dan persamaan antara pria dan wanita yang dijelaskan oleh teori fungsional struktural, biasanya menentukan dan memengaruhi pemberdayaan wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam teori ini, menurut perspektif Auguste Comte berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial harus ilmiah dan mempertimbangkan biologi sebagai dasar untuk memahami perkembangan manusia, dan inilah yang kemudian menjadi ilmu sosiologi. Dalam analisisnya, teori fungsionalisme mempertimbangkan perkembangan manusia dalam struktur masyarakat dan struktur biologi (Partini & Suyatna). Menurut beberapa sosiolog, organ dalam tubuh manusia diibaratkan sebagai organisasi sosial dalam masyarakat. Sebagai komponen struktural, lembaga sosial dianggap mampu mendukung kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup dan terpelihara. Misalnya lembaga ekonomi yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa (Partini & Suyatna).

Pandangan Durkheim sebagian besar berhubungan dengan analisis fungsional untuk memahami peran dari fakta sosial. Durkheim menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik utama yang mendasari fenomena ini. *Pertama* adalah fakta sosial

bersifat eksternal terhadap individu. Fakta sosial tersebut mencakup cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang menunjukkan adanya kesadaran yang berada di luar kesadaran individu. Misalnya, seseorang yang baru bergabung dalam sebuah kelompok mungkin merasakan adanya aturan atau norma yang tidak sepenuhnya dipahami, yang jelas menunjukkan sifat eksternal dari fakta sosial tersebut. *Kedua*, fakta sosial memiliki sifat memaksa individu. Sebagai bagian dari kelompok atau masyarakat, individu selalu dipengaruhi, diarahkan, didorong, diyakinkan, atau ditekan oleh fakta sosial di sekitarnya untuk bertindak sesuai dengan kehendak kelompok tersebut. *Ketiga*, fakta sosial bersifat menyeluruh atau tersebar luas di dalam masyarakat (Purwanto, 2007).

Perempuan sebagai makhluk sosial masih sering dipandang rendah karena konstruksi yang persepsi bahwa mereka adalah makhluk lemah. Perempuan sering dianggap sebagai budak dan kerap mengalami diskriminasi, baik fisik maupun mental, yang membuat mereka dianggap tidak penting di masyarakat. Kondisi ini membatasi ruang gerak sosial perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya (Musdhalifah & Sari, 2024). Padahal, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna, membawa harkat dan martabat sejak lahir. Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara, sama-sama ciptaan Tuhan dan kedudukan kemanusiaan mereka harus dihormati tanpa adanya diskriminasi (Uliyatul Marmu'ah, 2020).

Teori ini mengidentifikasi komponen-komponen mendasar yang membentuk masyarakat, mengkategorikan peran mereka, dan menjelaskan bagaimana komponen-komponen ini bekerja dalam masyarakat. Dahrendorf dalam buku *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba* menyebutkan bahwa teori ini didasarkan pada beberapa prinsip, misalnya masyarakat merupakan gabungan dari bagian-bagian yang berbeda. Sistem sosial selalu terjaga karena mempunyai perangkat dan prosedur pengendalian, perubahan terjadi secara bertahap, dan integrasi sosial tercapai apabila mayoritas masyarakat menyetujui serangkaian nilai (Marmonah, 2014).

Dari perspektif peran gender, teori ini menggambarkan masyarakat pra-industri dan menunjukkan bagaimana mereka diintegrasikan ke dalam sistem sosial. Laki-

laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai pengumpul (*gatherer*). Peran perempuan dalam rumah tangga lebih terbatas pada urusan reproduksi seperti melahirkan, mengasuh, dan menyusui anak. Pembagian kerja ini berjalan dengan baik dan berhasil menciptakan keberlangsungan masyarakat yang stabil (Marmoah, 2014).

Teori struktur fungsional tetap relevan dalam masyarakat modern. Salah satu kritik terhadap teori ini bahwa masyarakat terlalu bergantung pada realitas masyarakat pra-industri. Di sisi lain, masyarakat modern telah mengalami perubahan signifikan baik dalam bentuk maupun fungsi. Di masa lalu, sistem sosial lebih bersifat kolektif dan keluarga masih merupakan keluarga besar (Marmoah, 2014). Di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang beragam ini, peran laki-laki mengacu pada banyak norma umum yang ditentukan oleh daya saing dan keterampilan, dengan lebih memperhatikan faktor gender. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh peluang kompetitif (Marmoah, 2014).

## 2) Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Di Indonesia memberdayakan perempuan telah ada sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, sejumlah tempat telah mengalami peningkatan yang cukup dalam kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan kapasitas diri perempuan. Meskipun demikian, sejumlah besar perempuan Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, belum tersentuh oleh inisiatif pemberdayaan (Nur Suriyani, 2019). Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk memberikan akses terhadap perempuan, kontrol atas sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Agar dapat berperan aktif dan ikut serta dalam pemecahan masalah, perempuan dapat mengorganisasikan diri dan meningkatkan rasa percaya dirinya, serta mengembangkan keterampilan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan sekaligus menumbuhkan masyarakat mandiri yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi local (Bappeda DIY, 2018).

Meningkatkan kesadaran perempuan merupakan tujuan mendasar dari pemberdayaan masyarakat, yang mencakup peran perempuan, agar mereka dapat mewujudkan potensi dirinya. Nugroho (2008) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki beberapa tujuan antara lain, (a) Memperluas partisipasi perempuan dalam inisiatif pembangunan sebagai peserta aktif (subjek) dan bukan hanya menjadi objek pembangunan. (b) Meningkatkan kapasitas perempuan dalam peran kepemimpinan untuk memperkuat posisi negosiasi dan partisipasi mereka dalam semua pembangunan, termasuk sebagai pelaksana, perencana, dan pengamat serta penilai operasi. (c) Meningkatkan kapasitas perempuan untuk menjalankan usaha kecil dan besar serta rumah tangga untuk mengakomodasi meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan menyediakan peluang bagi tenaga kerja yang mandiri dan efektif. (d) Meningkatkan kemampuan dan peran organisasi perempuan sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan partisipasi aktif dalam inisiatif pembangunan lokal (Sulistiyani, 2022).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bersifat kompleks, mencakup berbagai sudut pandang dan perspektif teori. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan komunitas agar berpartisipasi secara aktif dan berdaya dalam perekonomian, menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan (Riyadi, 2024). Dengan menantang ideologi patriarki tentang dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mengubah lembaga dan struktur seperti yang terkait dengan keluarga, kasta, kelas, agama, dan pendidikan yang menegakkan dan mempertahankan ketidakadilan sosial dan diskriminasi gender. Semua sumber daya dan struktur kekuasaan harus siap dalam proses pemberdayaan karena memberikan kesempatan kepada perempuan miskin untuk mengakses dan mengendalikan pengetahuan dan sumber daya material (Ihsan MA. 2019).

Perjuangan kesetaraan gender digalakkan oleh budaya global, bahkan di Indonesia. Anggapan bahwa perempuan pada hakikatnya hanya "konco wingking" telah lama ditinggalkan, tetapi masih diharapkan bahwa tugas-tugas domestik dapat diselesaikan dalam kemitraan yang setara dan dengan berbagi peran dalam keluarga

yang sukses. Terpilihnya seorang perempuan sebagai Presiden, yang juga menjabat sebagai Kepala Negara dan memegang tampuk pimpinan Republik Indonesia yang kita semua cintai dan banggakan, merupakan bukti perubahan hukum yang memungkinkan pemberdayaan perempuan dalam pertumbuhan politik (Ihsan MA, 2019).

### 3) Metode Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat masyarakat agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dengan jalan memberikan motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan berdasarkan sumber daya yang dimilikinya melalui partisipasi, demokratisasi, pendidikan, dan pengalaman sosial (Efendi, 2022). Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam pelaksanaan pemberdayaan diperlukan suatu metode yang menjadi dasar pelaksanaan pemberdayaan (Dermawan, 2016).

- a. Membongkar mitos bahwa perempuan hanya pelengkap dalam rumah tangga. Mengingat adat istiadat "swarga nunut batin katut" (ke surga ikut ke neraka terbawa), perempuan dipandang sebagai konco wingking, atau pendamping di belakang suami. Nasib mereka sangat bergantung pada suami karena kata "nunut" dan "katut" dalam bahasa Jawa bermakna pasif dan kurang memiliki tindakan.
- b. Membekali wanita dengan berbagai keterampilan, agar wanita dapat mandiri dan produktif tidak bergantung pada laki-laki.
- c. Memberikan perempuan sebanyak mungkin kesempatan untuk mengejar pendidikan dan menggunakan apa yang mereka pelajari dalam kegiatan pemberdayaan.

Selain itu, dalam pengambilan keputusan, pemerintah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi atau lapangan kerja, meningkatkan keterlibatan perempuan, menargetkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif, melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, meningkatkan angka literasi melalui program pendidikan literasi atau

pemberantasan literasi, meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu dan anak, serta memberikan edukasi kepada ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan tenaga bidan yang berkualifikasi dan memberikan ASI kepada anaknya selama dua tahun, merupakan beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan (Nadia, 2022).

Perempuan dapat mengorganisir diri mereka sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri mereka agar dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah. Masyarakat secara keseluruhan harus dapat memberi mereka akses dan kendali atas sumber daya, ekonomi, politik, masyarakat, dan budaya. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan konsep diri mereka. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Membantu masyarakat merupakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat menjadi mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi lokalnya, dan terbebas dari keterbelakangan (Nadia, 2022).

Teknik analisis Longwe, kriteria pengembangan perempuan (*Women's Empowerment Criteria atau Women's Development Criteria*) diciptakan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Fitrina, 2016).

1. Aspek Kesejahteraan. Aspek ini adalah kesejahteraan material yang ditentukan oleh seberapa baik laki-laki dan perempuan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang meliputi perumahan, makanan, uang, dan kesehatan. Oleh karena itu, perbedaan antara tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan secara keseluruhan untuk setiap kebutuhan dasar mereka digunakan untuk menghitung kesenjangan gender dalam tingkat kesejahteraan ini. Pada kenyataannya, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan mengharuskan partisipasi mereka dalam proses pemberdayaan dan pada tingkat kesetaraan yang lebih tinggi.

2. Aspek Keadaan Kritis atau Penyadaran. Keyakinan bahwa perempuan berada dalam posisi sosial ekonomi yang lebih rendah daripada laki-laki dan bahwa pembagian kerja tradisional merupakan komponen tatanan abadi merupakan

penyebab ketidaksetaraan gender pada tingkat ini. Pada tahap ini, pemberdayaan memerlukan pengembangan pola pikir kritis dan penolakan sudut pandang, yang menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan bersifat diskriminatif dari tatanan sosial yang dominan dan bukan merupakan pengaturan alamiah. Landasan kesadaran gender adalah keyakinan bahwa mencapai kesetaraan gender merupakan suatu tujuan. Gagasan ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk perubahan menuju kesetaraan dan merupakan komponen ideologi dan proses pemberdayaan.

3. Aspek partisipasi. Keterlibatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dalam tahap perencanaan penetapan kebijakan dan administrasi, itulah yang dimaksud dengan partisipasi aktif perempuan. Dalam proyek pembangunan, elemen ini sangat penting, karena berkaitan dengan identifikasi kebutuhan, perencanaan proyek, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas, masyarakat, dan pemerintahan. Ini mengacu pada partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam identifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi di tingkat program. Pemberdayaan perempuan mengarah pada peningkatan keterlibatan, dan juga memainkan peran penting dalam memberdayakan lebih banyak perempuan.

4. Aspek Kekuasaan/Kontrol. Adanya interaksi kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan merupakan indikasi kesenjangan gender pada tahap ini. Rumah tangga, masyarakat, dan level yang lebih tinggi dapat mengalaminya. Ketika laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang setara dan tidak ada yang mendominasi atau memegang posisi dominan atas yang lain, hal ini dikenal sebagai kesetaraan kekuasaan. Hal ini menyiratkan bahwa perempuan sama mampunya dengan laki-laki untuk mengubah keadaan seputar status mereka, masa depan mereka sendiri, dan masa depan komunitas mereka.

## **B. Konsep Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial**

Perlindungan dan rehabilitasi sosial merupakan dua aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Di Indonesia, layanan ini diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti Departemen Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945, tujuan negara Indonesia antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi warganya. Hal ini antara lain dicapai melalui rehabilitasi sosial (JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2020).

Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, berkembang, dan memenuhi fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga Negara, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2020).

Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkadang menimbulkan beberapa permasalahan antar individu. Tidak jarang bahwa masalah yang terjadi merupakan tindak pidana, meskipun terkadang pelaku tidak menyadari bahwa pada saat itu tindakan yang mereka lakukan merupakan salah satu tindakan pidana (Administrator, 2023). Perempuan merupakan subjek hukum yang sering menjadi korban kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Terkadang, mereka berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan diri, sehingga perempuan yang menjadi korban kejahatan tersebut memerlukan bantuan orang lain. Maka, perlu adanya perlindungan terhadap perempuan (Administrator, 2023).

Perlindungan perempuan merupakan segala upaya untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-hak mereka melalui upaya yang konsisten dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender (Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2024). Dalam budaya yang didominasi laki-laki, penindasan terhadap perempuan dan anak-anak meningkat karena struktur sosial menjadi semakin tidak setara. Menurut budaya patriarki yang masih berlaku di masyarakat, perempuan lebih rendah dan laki-laki lebih unggul. Karena perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah manusia yang sama, dengan memperlakukan mereka sebagai objek dan bukan sebagai sasaran atau pelaku dalam kehidupan. Pada kenyataannya, tidak jarang masyarakat menyalahkan perempuan atas masalah sosial, seperti pemerkosaan yang menimpa perempuan, orang pertama yang dicurigai adalah perempuan karena pakaiannya, cara mereka berjalan, dan cara mereka berbicara, dan jika rumah tangga mengalami perceraian, perempuan adalah orang pertama yang dianggap negatif oleh masyarakat (Kartika & Ramdani, 2022).

Secara etimologi, "perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang memiliki awalan "per" dan akhiran "-an". Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dalam kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poelwodarminto (M. Hadjon, 1987). Keberadaan agama sebagaimana yang diwahyukan oleh Tuhan, pada hakikatnya, didasarkan pada upaya mencapai kemaslahatan umum (maslahat al-'amma) dalam konteks Islam. Melalui ajaran agama, seperti pengakuan hukum atas peran keluarga dan pengambilan tanggung jawab sosial dan moral, teks tersebut memberikan dasar teologis bagi umat manusia untuk menyebarkan kebaikan di bumi. Hakikat perlindungan menurut teori Maqasid al-Syariah, teori mubadalah, dan perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukum seperti undang-undang dan lembaga perlindungan. Pengertian Maqasid al-Syariah berasal dari kata "Maqsud" yang berarti "tujuan" dan "Syariah" yang berarti aturan yang bertujuan untuk melindungi setiap individu baik di dunia maupun di akhirat. Namun dari segi bahasa, itu adalah norma-norma yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Teori maqashid al-syariah sangat penting untuk merumuskan masalah yang belum terselesaikan karena merupakan dasar berijtihad untuk menetapkan hukum (Kartika & Ramdani, 2022: 330).

Menurut Kitab Ushul Fiqh ada lima aspek perlindungan yakni agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal). Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam hadir dengan misi perlindungan yang sangat mulia dan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al- Anbiya' [21]: 107). Para pendiri Syariah (Allah dan Rasul-Nya) memperkenalkan syariah dengan tujuan mencapai kebaikan umum, menghasilkan keuntungan dan mencegah kerugian terhadap umat manusia (Kartika & Ramdani, 2022: 332).

Kehadiran Islam secara global menunjukkan misi Tuhan untuk memajukan perdamaian dunia. Islam menekankan bahwa kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, dikutuk keras oleh agama. Sementara agama lain juga mengajarkan tentang anti kekerasan dan kekejaman terhadap perempuan, penganut Islam tidak diragukan lagi diajarkan bahwa kebaikan, termasuk sikap dan perbuatan terhadap orang lain, khususnya perempuan, merupakan tanda keimanan seseorang yang sempurna (Zaitunah Subhan, 2006: 35–36). Disebutkan juga bahwa orang yang baik adalah mereka yang berperilaku baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya. Maka, tidak tepat jika menganggap atau berasumsi bahwa Islam merendahkan atau menganiaya wanita. Karena Allah sangat tidak menyukai perilaku seperti itu. Kecenderungan untuk merendahkan ketika seseorang menganiaya atau menindas orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Sebagaimana disebutkan, orang-orang beriman harus menahan diri dari menyakiti satu sama lain. Islam secara keseluruhan melindungi perempuan dan menentang praktik-praktik kekerasan (Bustanul Arifin & Lukman Santoso, 2016: 120).

Islam juga menjelaskan upaya untuk melindungi perempuan, beberapa terminologi yang digunakan sebagai solusi atas kekerasan terhadap perempuan, sementara terminologi lain yang diusulkan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi perempuan dari kejahatan. Dalam salah satu hadist sahih disebutkan:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

Artinya: “Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku”.

Islam mendukung perempuan dengan memberikan hak kepada setiap perempuan. Selain itu, konsep musyawarah juga ada dalam Islam, meskipun hanya disebut beberapa kali dalam Al-Quran, tetapi dalam kehidupan Rasulullah SAW, musyawarah sering dilakukan, terutama ketika hal itu berkaitan dengan kepentingan umum. Konsep perundingan dalam agama menganjurkan pengangkat hakim atau pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan suami istri dengan niat untuk mengurangi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dan bukan menegaskan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan (Bustanul Arifin & Lukman Santoso, 2016: 121).

Istilah "re" (yang berarti "kembali") dan "habilitasi" (yang berarti "kapasitas") digabungkan untuk membentuk kata rehabilitasi. Rehabilitasi, secara umum adalah proses mengembalikan sesuatu ke kondisi awalnya atau membantu memperoleh pengganti yang sesuai dengan aslinya. Rehabilitasi sosial sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan membantu penderita disfungsi sosial untuk memenuhi kebutuhannya dalam konteks masyarakat tertentu. Ahli rehabilitasi sosial biasa disebut dengan *rehabilitation psychologist*, mempunyai fungsi dan tujuan yang sama. Artinya, pengembangan bidang psikologi untuk memberikan layanan (pembangunan sosial dan dukungan advokasi) untuk membantu pemulihan kembali ke kehidupan normal. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan harga diri, rasa percaya diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial (Pamungkas, 2020).

Dari sudut pandang Islam, Quraish Shihab mengatakan para ulama sepakat bahwa Islam bertujuan untuk melindungi lima hal utama yakni agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan kesehatan. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk mencapai potensi maksimalnya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan dan sesamanya. Psikoterapi Islam dapat dilakukan di pusat rehabilitasi dan tempat lain untuk merawat korban depresi mental. Pasien diminta untuk mengingat Allah SWT dengan berbagai pendekatan spiritual dan kemudian diperkenalkan juga dengan amalan Islam seperti wirid, dzikir, doa dan bentuk doa lainnya. Dadan Hawari, seorang psikiater dan ulama Indonesia, menjelaskan dalam

bukunya bahwa pemahaman agama (Islam) dapat diterjemahkan ke dalam kesehatan mental melalui pendekatan kepada Sang Pencipta (Pamungkas, 2020).

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan keberfungsian sosial seseorang agar dapat berinteraksi dan berkontribusi kepada masyarakat. Standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan pekerjaan sosial profesional ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017. Seseorang dapat secara efektif menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses rehabilitasi sosial, yang melibatkan refungsionalisasi dan pengembangan (Pratiknyo, 2022). Ada dua jenis rehabilitasi sosial yakni rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi sosial dasar bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang, sedangkan rehabilitasi sosial lanjutan bertujuan untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memberikan dukungan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mampu melakukan tugas sosial karena hambatan sehingga memerlukan dukungan sosial serta memulihkan dan mengembangkan kinerja. Layanan untuk memulihkan dan mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental serta sosial secara memadai, dan untuk memungkinkan keluarga dan masyarakat yang menderita gangguan sosial dapat menjalankan fungsi sosial mereka secara wajar (JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2020). Standar rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh para profesional pekerjaan sosial, berfungsi sebagai acuan dan panduan praktik pekerjaan sosial dalam layanan persuasif, motivasi, dan koersif untuk mencapai penyembuhan dan pemulihan bagi individu, keluarga, dan komunitas. Melindungi penerima dari kesalahan praktis dalam pelaksanaan langkah-langkah rehabilitasi sosial. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial serta memperluas jangkauan rehabilitasi sosial (Pratiknyo, 2022).

Rehabilitasi sosial ditujukan kepada masyarakat yang mengalami kondisi seperti kemiskinan, penelantaran, disabilitas, keterpencilan, gangguan sosial, dan penyimpangan perilaku serta memerlukan perlindungan khusus, yakni seperti penyandang disabilitas fisik dan mental, orang gangguan sensorik, penyandang

disabilitas intelektual, pelacur, tuna susila, pengemis, mantan narapidana di lembaga kemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat lainnya, pengguna obat psikotropika dengan sindrom ketergantungan, orang yang menderita *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, korban kekerasan, korban perdagangan manusia, anak terlantar, anak minoritas dan terisolasi, anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, lanjut usia yang miskin dan terlantar (Pratiknyo, 2022).

Menurut Sunaryo (1995: 109-110) karya Damar Cahyono, keberhasilan program rehabilitasi tergantung pada kemauan klien untuk direhabilitasikan kembali ke dalam masyarakat. Para ahli hanya memberikan arahan dan memfasilitasi keberfungsian untuk keberhasilan program yang dilaksanakan. Hambatan terhadap layanan rehabilitasi sosial disebabkan oleh dua faktor (Tanda dan Suprayoga, 2021).

- a) Hambatan yang timbul karena faktor internal atau lingkungan, yaitu hambatan yang timbul karena kurangnya perhatian keluarga, kasih sayang keluarga, sikap negatif individu, latar belakang dan pengaruh individu.
- b) Hambatan yang timbul dari faktor eksternal, yaitu hambatan yang timbul dari luar diri penerima layanan rehabilitasi sosial.

### BAB III

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### A. Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 1. Letak Geografis BPRSW

Lokasi BPRSW Yogyakarta dijalan Cokrobedog Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, BPRSW Yogyakarta menempati lahan seluas 9.995 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 1.750 m<sup>2</sup>. Lokasi ini sangat ideal untuk tempat tinggal dan rehabilitasi sosial karena berada di Dusun Cokrobedog yang tenang dan jauh dari keramaian. Selain itu, mengendarai motor maupun mobil dapat dengan mudah mencapai BPRSW. Lokasinya mudah dijangkau dengan petunjuk yang tersedia (Google Maps). Lokasinya berada di tengah pedesaan Sidoarum, bersebelahan dengan jalan ring road, dan hanya berjarak 2 kilometer. Berikut peta lokasi Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta.

**Gambar 3.1 Peta lokasi BPRSW Yogyakarta**



Sumber: Dokumen BPRSW Yogyakarta

## **2. Sejarah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta**

BPRSW Yogyakarta merupakan salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang berbentuk balai atau panti sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRSW Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang membantu perempuan yang mengalami masalah sosial dengan memberikan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial. BPRSW yang beralamat di Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Sleman Yogyakarta. DIY merupakan lembaga Unit Pelaksana Pelayanan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan nama Sarana Rehabilitasi Karya Wanita (SRKW) yang berdiri pada tahun 1981. Pada tahun 1995, SRKW berubah nama menjadi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22/HUK/1995. Setelah Kementerian Sosial bubar pada masa otonomi daerah, PSKW ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah dan Tata Kerja UPTD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbit pada tahun 2008. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) Yogyakarta berdiri pada tahun 2015 setelah terbitnya Pergub Nomor 100 Tahun 2015 tentang Kelembagaan (Sri Suprpti, 2018).

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) Yogyakarta di bawah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap perempuan di DIY dan melaksanakan pemberdayaan, pelayanan, serta rehabilitasi sosial bagi korban masalah kesejahteraan sosial, perempuan risiko sosial ekonomi, pekerja seks komersial (PSK), korban kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, dan korban perdagangan orang.

## **3. Visi, Misi, dan Tujuan BPRSW**

Visi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) adalah “Terwujudnya wanita bermartabat, berakhlak dan mandiri dengan pelayanan

perlindungan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas dan profesional” (Dokumentasi BPRSW Yogyakarta).

Sedangkan Misi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) adalah:

- a. Menyusun program perlindungan sosial bagi perempuan penyandang masalah sosial yang mengutamakan keamanan dan mutu layanan
- b. Meningkatkan fungsi sosial perempuan melalui pemberian kegiatan fisik, mental, sosial, dan keterampilan
- c. Ikut serta dalam upaya peningkatan kontribusi perempuan terhadap pembangunan masyarakat dan kehidupan sosial
- d. Meningkatkan mutu layanan melalui perluasan kemampuan staf dan peningkatan infrastruktur serta fasilitas pendukung
- e. Mengkoordinasikan proses pengembangan model layanan
- f. Memanfaatkan jejaring dan kolaborasi untuk menanggulangi masalah sosial perempuan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat
- g. Melaksanakan penelitian, pengembangan kesejahteraan sosial, dan fasilitasi layanan masyarakat bagi perempuan penyandang masalah sosial (Dokumentasi BPRSW Yogyakarta).

Tujuan BPRSW adalah untuk membantu klien mencapai potensi penuh mereka untuk kehidupan yang produktif dengan memulihkan rasa tanggung jawab sosial, harga diri, dan kepercayaan diri, serta kesiapan dan kemampuan mereka untuk memenuhi peran sosial di masyarakat. (Dokumentasi BPRSW Yogyakarta).

#### 4. Struktur Organisasi BPRSW

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran peneliti, struktur organisasi BPRSW Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Struktur organisasi BPRSW**

No	Nama	Jabatan
1	Widiyanto, S.Sos.,MP.	Kepala Balai PRSW
2	Herawati, A.K.S.	Pekerja Sosial Ahli Madya

3	Ibnu Sholeh, S.IP.	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
4	Sri Lestari, S.ST.,M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha
5	Ratri Gumelar, S.Sos.	Pekerja Sosial Ahli Pertama
	Devi Kurniasih, S.Sos.	
6	Anah Wigati, S.Psi.	Pekerja Sosial Terampil Penyelia
7	Herna Octaviani, S.Psi.	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
	Itsna Himmaty Zainab Sarjanawati, S.Psi.	
	Sumarmiyati, S.Psi.	
8	Bowo Mursito, S.KM., MPA.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
9	Ritanti	Pranata Kearsipan
10	Prapti Susanti	Verifikator Data Laporan Keuangan
11	Lagiyono	Pelaksana
12	Rachmawaty, A.Md.,Sek.	Pengelola Asrama
13	Erni Andikasari, A.Md.	Pengelola Akuntansi
14	Fajar Sriwirani	Pengadministrasian Persuratan
15	Jemuarini	PPPK DIY Pengolah Makanan
	Pipit Kusmawati	
16	Muhrokob	PPPK DIY Pengelola Persuratan
17	Heri Priyono	PPPK DIY Pengelola Sarana dan Prasarana
18	Maydisa Dwi Jayantie	PPPK DIY Pelayanan Pasien
	Dewi Marsiti	

Sumber: Dokumentasi Balai PRSW Yogyakarta

## 5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana BPRSW Yogyakarta

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Luas tanah	9.995 m <sup>2</sup>
2	Luas bangunan	1.750 m <sup>2</sup>
3	Kapasitas tampung	70 orang
4	Kapasitas isi	50 orang
5	Jangkauan pelayanan	Daerah Istimewa Yogyakarta
6	Kantor	240 m <sup>2</sup> (lantai dasar)
7	Aula	240 m <sup>2</sup> (lantai atas)
8	Asrama	3 unit
	Asrama Kunthi	360 m <sup>2</sup>
	Asrama Sembodro	360 m <sup>2</sup>
	Asrama Srikandi	360 m <sup>2</sup>
9	Ruang pendidikan	120 m <sup>2</sup>
10	Ruang keterampilan jahit	160 m <sup>2</sup>
11	Ruang salon/tata rias	70 m <sup>2</sup>
12	Ruang olah pangan	70 m <sup>2</sup>
13	Ruang poliklinik	20 m <sup>2</sup>
14	Ruang konsultasi	70 m <sup>2</sup>
15	Ruang makan dan dapur	160 m <sup>2</sup>
16	Mushola	50 m <sup>2</sup>
17	Lapangan olahraga dan upacara	680 m <sup>2</sup>
18	Lahan kebun	1.350 m <sup>2</sup>
19	Lahan pertanian dan perikanan	1.000 m <sup>2</sup>
20	Pagar pengamanan	300 m <sup>2</sup>
21	Garasi motor dan mobil	Motor (30 m <sup>2</sup> ) dan Mobil (40 m <sup>2</sup> )
22	Kendaraan roda 4	2 unit
23	Kendaraan roda 2	3 unit

Sumber: Dokumentasi Balai PRSW Yogyakarta

## **6. Masalah Sosial yang Dihadapi Perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta**

Berikut beberapa masalah sosial yang dihadapi oleh perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*)**

Setiap keluarga berharap dapat terwujudnya keluarga bahagia yang penuh rasa saling mencintai, baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, setiap keluarga ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun nyatanya tidak semua keluarga dapat hidup dengan lancar, karena akan timbul rasa tidak nyaman, tertekan, sedih, takut dan benci satu sama lain. Fakta menunjukkan masih banyak keluarga bermasalah bahkan berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di beberapa keluarga seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan.

Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1993, yang disebut ketidakseimbangan kekuasaan historis antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan serta hambatan terhadap kemajuan mereka, tercermin dalam kekerasan terhadap perempuan. (Nasrullah, 2016: 178-179).

Pengertian kekerasan pada mulanya terdapat pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa “membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana kekerasan itu dilakukan. Demikian pula, tidak menjelaskan bentuk kekerasan,

sedangkan “ketidakberdayaan” diartikan sebagai tidak adanya kekuatan atau energi yang membuat korban tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Namun dalam ketentuan KUHP, kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan) (Soeroso, 2010: 1).

Lahirnya UU PKDRT merupakan tonggak sejarah bagi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan dan anak, yang rentan terhadap kekerasan. Undang-undang tersebut antara lain mengatur langkah-langkah untuk mengantisipasi munculnya kekerasan baru dan menjabarkan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan (Ridwan, 2006: 80). Undang-undang PKDRT bertujuan untuk melindungi perempuan, khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan tersebut tertuang dalam ketentuan umum UU PKDRT (Lianawati, t.t: 153-154). Melalui undang-undang ini, korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi dan diberikan kepastian hukum dalam mencari keadilan. Jika KDRT diposisikan sebagai perkara perdata, urusan pribadi setiap orang, kini menjadi perkara pidana dan urusan publik (Jamaa & Hadidjah, 2008: 45).

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti:

1. Kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau cedera (Pasal 6 UU KDRT). Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban antara lain menampar, memukul, menarik, menginjak-injak, menendang, mencekik, melempar benda keras, menyiksa dengan benda tajam (misalnya pisau, gunting, besi) dan membakar (Ridwan, 2006: 85).
2. Kekerasan psikis, yaitu perilaku yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya mobilitas, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis yang berat (Pasal 7 UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dialami perempuan antara lain makian, hinaan terus-menerus yang dirancang untuk merendahkan harga diri korban, teriakan-teriakan dan ancaman yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut.

3. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU PKDRT). Kekerasan seksual dalam pengertian Pasal 5(c) meliputi: (1) Hubungan seksual secara paksa terhadap orang yang tinggal dalam rumah tangga, (2) Hubungan seksual secara paksa terhadap seseorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan tidak diinginkan yang bernuansa seksual, yang sering disebut sebagai “pelecehan seksual”, dan berbagai bentuk hubungan seksual yang dipaksakan, yang disebut pemerkosaan.

4. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT). Setiap orang dilarang menelantarkan salah satu anggota keluarganya, meskipun ia diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian yang berlaku padanya untuk menafkahi kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan yg diatur pada UU PKDRT mencerminkan beragam macam bentuk kekerasan yg terjadi pada masyarakat. Dalam kasus kekerasan berbentuk fisik, pembuktian sangat mudah dilakukan dengan mengikuti ketentuan KUHP yang jelas kriterianya. Jenis kekerasan psikologis dan penelantaran dalam rumah tangga prosedur pembuktian menjadi menantang atau sulit karena melibatkan perasaan subjektif. Menurut buku “Patologi Sosial” karya Ahmad Chusairi, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. *Pertama*, keluarga tersebut memiliki masalah psikologis yang berasal dari trauma masa kecil, tinggal di lingkungan yang penuh kekerasan, dan memiliki basis sumber daya ekonomi yang dominan. Suami yang bergantung secara ekonomi merasa kuat dan mungkin menggunakan kekerasan terhadap pasangannya. Akses terhadap sumber daya ekonomi berubah menjadi kekuatan tersendiri dan melemahkan struktur kekuasaan di tingkat makro (negara) dan mikro (keluarga).

*Kedua*, suami yang mempunyai permasalahan psikologis, baik karena tekanan pekerjaan maupun permasalahan pribadi di luar rumah. Masalah psikologis ini menimbulkan stres dan berujung pada perilaku kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal

yang melampaui batas-batas nasional dan budaya. Seperti KDRT yang disampaikan oleh klien W pada tanggal 5 November 2024:

“Sebabnya itu karena dia (suami) mabuk, pergaulan dari temen”nya sih sehingga terpengaruh”

Menurut LKBHUWK, sebuah organisasi pendukung hukum bagi perempuan dan keluarga, ada dua penyebab kekerasan dalam rumah tangga internal dan eksternal. Faktor internal mengacu pada ciri-ciri watak atau kepribadiannya, pelaku cenderung bertindak kasar saat merasa marah atau frustrasi. Ciri-ciri agresif biasanya muncul dari interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial selama masa kanak-kanak (Soeroso, 2010: -76).

Faktor internal dalam keluarga meliputi buruknya komunikasi antara suami dan istri, yang berakibat pada sikap saling tidak setia, tidak percaya, dan tidak mampu bersikap terbuka, yang menimbulkan perasaan sakit hati, emosi, dendam, dan akhirnya kekerasan. Seperti yang dialami dan disampaikan klien D pada tanggal 5 November 2024:

“Perasaan rasa cemburu yang berlebihan, terus saya menggunakan logika, kenapa hal yang tidak biasa dia lakukan sehingga membuat rasa cemburu saya itu semakin membesar. Biasa kalo saya memegang hp dia selalu dimarahin, kalo mandi selalu bawa hp, padahal dulunya nggak, setelah itu kalo kerja banyak bngget waktunya, padahal dulu sudah bikin kesepakatan, kalo kerja monggo kalo malam mungkin bisa lah dibilang jam 10-11 balik. Rasa cemburu saya dan logika saya bercampur aduk sehingga saya tidak pernah membuka pikiran jernih, saya bersikap seperti itu saya melawan, saya menjadi banyak pikiran negatif karena itu tadi”.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku kekerasan. Bahkan orang yang tidak menunjukkan perilaku agresif pun dapat terlibat dalam perilaku kekerasan saat menghadapi situasi yang membuat frustrasi seperti kesulitan keuangan yang terus-menerus, kekerasan terhadap pasangan, atau penyalahgunaan obat. Faktor lingkungan lainnya termasuk stereotip yang membuat pria dominan, suka menuntut, dan agresif. Meski perempuan harus bersikap pasif, lemah lembut, dan sombong, namun sosok-sosok inilah yang bertanggung jawab atas banyak tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh klien W pada tanggal 5 November 2024:

“karena dia (suami) mabuk, pergaulan dari temen”nya sih sehingga terpengaruh”.

#### **b. Perdagangan Manusia (Human Trafficking)**

Dalam pandangan semua agama, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghormatan terhadap ciptaan Tuhan, sudah selayaknya dan sepantasnya rasa hormat yang setinggi-tingginya diberikan kepada manusia. Namun kenyataannya, manusia diperlakukan seperti binatang. Perbudakan telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Perbudakan kini telah digantikan dengan nama yang lebih modern yakni perdagangan manusia. Pada masa perbudakan, orang secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja dan orang lain untuk dijadikan gendik (pembantu), selir atau istri simpanan, namun saat ini mereka digunakan sebagai pembantu rumah tangga bagi pekerja seks komersial, dan lain-lain (Nasrullah, 2016: 227). Dengan berkembang dan majunya teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, kriminalitas jual beli orang juga semakin meningkat. Beberapa pekerjaan dilakukan secara tertutup dan di luar hukum. Jika dianalisis lebih lanjut, perdagangan dan perbudakan mengandaikan hierarki sosial dari komunitas yang berbeda. Ketika kelompok yang paling berkuasa dalam masyarakat mendominasi kelompok yang lebih lemah dan memperoleh kekuatan ekonomi dan politik, peluang berkembangnya perbudakan semakin besar (Nasrullah, 2016: 227-228).

Farhana (2012: 4) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Faktor utamanya antara lain kemiskinan, kurangnya lowongan pekerjaan, pergeseran arah pembangunan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang tiada henti. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi orang lain dalam prostitusi dalam konvensinya tahun 1949, diikuti dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam konvensi tahun 1979 dan Konvensi

Hak Anak tahun 1989. Bila kekuasaan panglima menguasai segalanya, maka hukum pun menjadi tidak berdaya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan adalah mimpi kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman (Kusumaatmadja, 2006: 199). Namun, kita harus mengakui upaya komunitas hukum untuk menghentikan perdagangan manusia. Kata trafficking mengandung arti 'perdagangan', namun pengertian ini bersifat umum dan dapat mencakup segala bentuk perdagangan manusia, sehingga masih sangat abstrak. Hal ini mencakup eksploitasi, khususnya eksploitasi tenaga kerja (melalui pemaksaan tenaga kerja terhadap orang-orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (melalui penggunaan dan penjualan tubuh serta ketertarikan seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seksual). Ini sesuai dengan yang di alami klien K, dia menyampaikan pada tanggal 4 November 2024:

“Aku tuh waktu itu pernah dapat pelecehan seksual, setelah itu kan ayah aku tau, awalnya gak terima, terus mau dilanjuti ke yang bertanggung jawab habis itu disuruh visum gara-gara ada bekas luka, habis itu aku dirumah terus mbak, gak taunya ternyata ayah itu diajak berdamai terus ayah aku minta uang 50 juta ternyata yang dikasih hanya 20 juta, dan disitu orang nya (pelaku) itu kabur, dari situ lah mulai aku dijual terus dengan ayahku, dan aku gak tau siapa aja mereka itu”.

### c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global baik di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia maupun di negara-negara industri maju. Hampir semua negara berkembang, mayoritas penduduknya hidup dalam kemiskinan dan hanya sebagian kecil penduduk yang dapat memperoleh manfaat dari pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk miskin belum banyak ditingkatkan terhadap pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini. Sebaliknya justru membuat mereka semakin tidak bahagia. Kemiskinan merupakan realitas sosial yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin, namun juga mempunyai akibat yang sangat buruk dalam kehidupan manusia. Karena siklus kemiskinan menimbulkan permasalahan lain seperti

pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan, sehingga banyak sekali masyarakat yang berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menyimpang dari norma yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan kejahatan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, khususnya upaya pasca krisis yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan, mengandung pembelajaran yang berharga, dan mungkin bagi pembangunan nasional secara umum dan bagi pengelolaan kebijakan nasional untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan rakyat, bahwa masyarakat miskin menjadi sasaran pembangunan perlu diperbaiki. Artinya, pemberantasan kemiskinan harus melibatkan masyarakat miskin sebagai agen pembangunan, dan kemiskinan dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, angka kemiskinan menurun, pada tahun 2023 berjumlah 448,47 menjadi 445,55 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sudah adanya masyarakat yang diberdayakan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan kepada mereka. Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) (Mikkelsen, 2003: 193) menganggap kemiskinan sebagai ketidakmampuan suatu masyarakat yang diukur dengan standar hidup tertentu, dan konsep kemiskinan relatif mengacu pada analisis komparatif dinegara kaya dan negara miskin.

Dalam buku *Patologi Sosial*, M. Citrus menjelaskan bahwa masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri, yakni tidak mempunyai cukup faktor produksi seperti tanah, modal, dan keterampilan, tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, memiliki latar belakang pendidikan rendah dan belum tamat SD atau SMP. Mereka tidak punya waktu untuk belajar karena membuang waktu untuk mencari nafkah. Masyarakat yang tinggal di pedesaan tidak mempunyai tanah walaupun tanahnya kecil, kebanyakan masyarakat tinggal di perkotaan, berusia muda, tidak memiliki keterampilan dan pendidikan, dan bekerja sebagai buruh kasar, pedagang musiman, tukang ojek, dan pembantu rumah tangga (ART).

Hal ini sesuai dengan yang dialami dan disampaikan oleh klien A pada tanggal 6 November 2024:

“Karena saya dijalan terus saya mengamen, kemudian disuruh Satpol PP rujuk kesini, saya begini juga karena keadaan posisi orang tua tidak ada, mau cari uang kemana, kerjaan kalo gak ada ijazah pasti nyari kerjaan susah”.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan menerapkan kebijakan yang memperkuat peran dan situasi ekonomi penduduk dalam perekonomian nasional dan serta membawa perubahan struktural. Program yang dipilih harus mendukung dan memperkuat masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian nasional. Sejumlah upaya konkrit pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dijabarkan dalam berbagai program dan diharapkan menjadi instrumen utama aksi tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan konsolidasi program pengentasan kemiskinan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan pendidikan dan kesehatan khusus.
3. Program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya keuangan seperti usaha mikro, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro dan lain-lain.

## **B. Proses Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istiewa Yogyakarta**

Melalui berbagai kegiatan aktif, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) memberdayakan perempuan dengan membantu melupakan kesulitan yang mereka hadapi dan merasa lebih berdaya. Pendekatan BPRSW dalam memberdayakan perempuan bersifat bertahap. Semua klien berpartisipasi dalam serangkaian latihan pemberdayaan yang membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Dari tahap screening hingga tahap penghentian/terminasi.

“Kan dari awalnya kita sudah membekalinya dari keterampilan (soft skill), dari mulai nol sampai dia mampu. Jika dia sudah mampu, proses selanjutnya adalah dipraktek belajar kerjakan, diperusahaan atau di pengusaha. Misalnya keterampilan batik, jadi pengusaha batik bisa. Mereka mempraktekkan ilmunya yang didapat di

BPRSW, seperti bagaimana menanggapi pelanggan, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana manajemen penjualannya, dan sebagainya. Artinya, itu sudah mulai pemberdayaan”. (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 1 November 2024)

Hal ini dilakukan agar terwujudnya program pemberdayaan perempuan di BPRSW yang efektif. Beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta yakni melalui tahapan sosialisasi, penjangkauan dan penerimaan klien, tahap rehabilitasi sosial, tahap resosialisasi, tahap bimbingan lanjut dan tahap terminasi.

“Tahap awal ada pengenalan (Engagement), kemudian ada assessment, kemudian rencana intervensi dengan membuat rencana intervensi jangka pendek, rencana intervensi jangka menengah, dan intervensi jangka panjang. Setelah itu kita intervensi dengan program perlindungan dan program rehabilitasi. Setelah itu kita resosialisasi serta yang terakhir terminasi”. (Ibu Herawati wawancara tanggal 4 November 2024).

## **a. Tahapan dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta**

### **1. Tahap Sosialisasi, Penjangkauan, dan Penerimaan Klien**

#### **a). Penyebarluasan Informasi**

Koordinasi dilakukan per kabupaten atau kota sesuai dengan lingkup BPRSW, khususnya di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ini dikarenakan BPRSW terintegrasi dibawah naungan Dinas Sosial Yogyakarta. Klien BPRSW berasal dari setiap kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program sosialisasi kesejahteraan sosial di setiap desa dan kecamatan menjadi dasar upaya rekrutmen atau penerimaan klien di BPRSW, dengan berpartisipasi dalam pertemuan masyarakat di wilayah binaan BPRSW sesuai dengan norma yang berlaku. Informasi yang disebarkan BPRSW meliputi layanan dan kegiatan di BPRSW (Wawancara dengan pekerja sosial, 4 November 2024).

Selain sosialisasi, BPRSW juga memanfaatkan media yaitu dengan menyebarkan leaflet dan brosur tentang BPRSW. Menjelaskan dan menjabarkan beberapa hal terkait BPRSW dapat membantu masyarakat mengetahui apa saja isinya. Apabila di setiap kecamatan dan kelurahan terdapat warga yang memenuhi persyaratan dapat langsung mendatangi BPRSW atau Dinas Sosial.

## b). Penjangkauan

Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) Yogyakarta, sosialisasi merupakan langkah krusial dalam membantu perempuan yang menghadapi masalah sosial untuk mendapatkan layanan. Untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang BPRSW Yogyakarta, dilakukan kunjungan langsung ke masyarakat atau orang yang menjadi sasaran layanan.

“Kita sekarang sudah bekerja sama dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, dulu kita fokus cuman kita yang fokus ke kita untuk menangani masalah korban tindak kekerasan, sekarang sudah ada upaya untuk bekerja sama dengan satuan-satuan, gerakan-gerakan yang ada di masyarakat, seperti SIKRAK (Satuan anti kekerasan) PPA ini juga gerakan yang menangani kekerasan. Sekarang banyak gerakan-gerakan yang menangani kekerasan, sekarang kita sudah mencoba bekerja sama kita kuatkan lagi, menjalin relasi, satu suara, kita tumbuhkan kerjasama kita lagi untuk tim korban kekerasan, agar dalam penjangkauan klien ini dapat sesuai dengan targetnya” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

Layanan BPRSW ditujukan bagi individu berusia 17 hingga 40 tahun. Usia produktif seseorang menjadi titik awal dalam menghitung persyaratan usia. Meskipun ada batasan usia tersebut, BPRSW juga melayani sejumlah klien yang berusia di bawah 17 tahun. Klien yang berusia di bawah 17 tahun merupakan korban yang rentan secara sosial. Seperti kehamilan di luar nikah, mengalami kekerasan seksual dan nonseksual, dieksploitasi secara finansial, dan putus sekolah. Polisi telah merujuk sejumlah klien, banyak di antaranya berusia di bawah 17 tahun. Pelaku kejahatan atau siapa pun yang tertangkap dalam penyelidikan yang masih di bawah umur dirujuk oleh polisi, karena mereka masih dalam pengawasan orang tua, anak di bawah umur tidak dapat dipenjara. Dikarenakan rata-rata klien BPRSW berada dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan, BPRSW melayani klien perempuan yang terpapar eksploitasi sosial-ekonomi. Orang tua klien pada umumnya bekerja sebagai buruh dan diketahui berpenghasilan minim. Klien lebih rentan terhadap eksploitasi finansial dan pekerjaan yang tidak diinginkan seperti prostitusi karena status keuangan keluarga yang tidak menentu. Rendahnya status ekonomi suatu keluarga dapat menimbulkan dampak

sebagai anak-anak putus sekolah, kekerasan, dan rusaknya hubungan keluarga (*broken home*).

#### c). Pendekatan Awal dan Rekrutmen

Pihak berwenang mengambil pendekatan awal berdasarkan informasi dari pendaftaran perorangan, laporan masyarakat, dan rujukan (dari masyarakat, kelompok sosial, LKS/LSM, dan lembaga lainnya). Strategi pertama adalah memberikan informasi yang lengkap kepada calon klien tentang program yang diikutinya serta hak dan kewajibannya selama mengikuti program tersebut. Sebelum bekerja sama dengan pengurus setempat, strategi awal yang dilakukan adalah mendatangi kediaman calon klien. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong calon klien agar berpartisipasi dalam kegiatan selama di BPRSW Yogyakarta.

“...terus partisipasi yang berhak untuk mengatasi kekesaran ini kita sekarang bekerjasama tidak hanya menangani sendiri jadi kita kompak aja satu suara, kalau ada apa-apa kita kerjasama. Jadi penanganan itu bisa bareng-bareng, kalau dulu kan sendiri-sendiri terus yang nangani lepas aja sekarang kita ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dan juga program yang kita laksanakan nantinya dapat mereka terima mbak” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

#### d). Orientasi dan Konsultasi

Setelah berinteraksi dengan keluarga dan calon klien, pekerja sosial menawarkan orientasi dan konseling kepada mereka. Uraian tentang program dan kegiatan di BPRSW disertakan dalam materi orientasi, disertai penjelasan singkat tentang mata pelajaran seperti psikologi, agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kegiatan sehari-hari lainnya, seperti setiap asrama melakukan bakti sosial setiap pagi sebelum belajar di aula, dan sebagainya. Selama fase orientasi, penjelasan harus relevan dan terkait dengan BPRSW. Ada juga bentuk orientasi dan konsultasi, misalnya pegawai mengajak anggota keluarga atau calon klien untuk mengamati aktivitas klien BPRSW, berkeliling ke semua ruangan yang ada di BPRSW, dan menjelaskan dengan rinci beberapa uraian program BPRSW.

“Untuk sekarang mereka kita kasih waktu bebas dulu biar mereka bisa mengenal lingkungan di BPRSW ini, nanti dalam seminggu jika dilihat mereka cocok ditempat ini maka akan ditindak lanjuti, tapi kalau tidak maka akan kita

pindahkan ke lembaga yang cocok, seperti ada kasus kekerasan seksual dari korban tunawicara, posisi dalam keadaan hamil besar mau melahirkan, karena disana tidak ada fasilitas untuk melahirkan jadi dirujuk ke tempat kita, setelah melahirkan disini, ternyata gak bisa konek kegiatannya, karena harus memakai bahasa, bisa aja tapi harus pelan dan kita juga kurang paham, karena intelektualnya juga rendah, kalau ngikutin disini tidak bisalah langsung konek. Jadi kita menyesuaikan dulu anaknya sampai selesai lahi, ouh ternyata ini bagus ke BRTPD” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

#### e). Identifikasi

Setelah orientasi dan konsultasi, tahap selanjutnya adalah identifikasi. Pekerja sosial melaksanakan langkah ini untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci mengenai calon klien yang masuk ke BPRSW. Penyelidikan difokuskan pada latar belakang calon klien tersebut, termasuk aspek-aspek seperti keluarga, pendidikan, rutinitas harian, dan aktivitas mereka sebelum mereka tiba di BPRSW. Selain itu, pekerja sosial berusaha untuk menentukan apakah ada riwayat yang terkait dengan kasus klien dan alasan mereka untuk masuk ke BPRSW. Riwayat terdokumentasi calon klien dicatat oleh pekerja sosial menggunakan formulir yang telah ditentukan.

“Kita screening kondisinya seperti apa, baik itu kesehatannya, psikologisnya, dari dimensi sosialnya, dan dari dimensi permasalahannya sendiri, itu di screening oleh mereka yang professional kalau kesehatan oleh dokter, pekerja sosial, konselor dan psikolog. Nantikan akan ditemukan kondisi PPKS itu. Kondisinya seperti apa, maka kalau dia perlu penanganan traumatic itu ada wisma trauma center itu tempatnya disitu, dan selama di trauma center itu ada upaya perlindungan baik perlindungan akan hak-haknya, maupun perlindungan dari ancaman dari luar” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

#### f). Motivasi

Dalam melakukan penyadaran terhadap perempuan yang ada di BPRSW, pekerja sosial memberi semangat kepada klien dengan memberikan perhatian dan motivasi kepada mereka. Motivasi ini penting agar klien merasa lebih baik. Klien juga didorong untuk harus belajar dan tidak boleh pantang menyerah (gagal). Dengan memberi mereka dorongan, klien yang memiliki kasus pribadi dapat berbicara dengan pekerja sosial atau psikolog tentang pengalaman mereka. Calon klien menerima motivasi dalam program yang ditawarkan oleh BPRSW, baik secara langsung maupun melalui teman dekat dan keluarga.

“...mereka sebelum dimasukkan ke balai awalnya tidak mau mbak, takut bosan tapi gara-gara mereka diberi motivasi seperti program dan rehabilitasi apa yang akan mereka dapat selama disini, jadinya mereka mau walaupun susah untuk dibujuk” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

g). Seleksi

Pada tahap seleksi dilakukan untuk mengidentifikasi klien yang memenuhi kriteria sebagai perempuan yang mengalami masalah sosial. Di antara indikator yang ditetapkan oleh BPRSW adalah usia 17-40 tahun, adanya masalah sosial termasuk dalam kelompok kurang mampu, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menunjukkan komitmen dan kemauan.

“Disini ya kita kasih waktu aja mbak seminggu untuk mereka mengenal lingkungannya, biar akrab dengan PPKS lainnya, soalnya PPKS kan ada yang masih umurnya lebih muda, jadinya sifat luarnya masih belum bisa dikontrol dalam berbicara dengan yang lebih tua” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

h). Registrasi

Registrasi dilakukan dengan mencatat nomor registrasi, pengenalan lingkungan BPRSW, dan catatan dalam buku induk. Selama prosedur rehabilitasi, nomor ini digunakan untuk melacak perkembangan klien. Secara teknis, pencatatan nomor ini akan didaftarkan secara resmi setelah prosedur evaluasi dan persetujuan calon klien. Untuk menentukan informasi pribadi klien, riwayat masalah, dan hasil penilaian, semua data klien didokumentasikan secara lengkap.

“...setelah mereka nanti kenal dengan sesama PPKS lainnya, nanti akan ditindak lanjuti kasus mereka, sebelumnya kita mencatat dulu untuk arsip kita dalam laporan kasus klien” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

i). Pengungkapan dan Penelaahan Masalah

Setelah registrasi, selanjutnya tahap pengungkapan dan analisis masalah, yang mengungkap masalah psikologis, sosial, dan kesehatan mental klien. Menggunakan tes psikologis dan wawancara untuk mengidentifikasi dan menyelidiki masalah, dalam hal ini pekerja sosial dan psikolog harus terlibat.

“Dari kasus yang laporkan, kita mempertimbangkan klien dalam rencana intervensinya, kalau dalam kontrak layanan semisal satu tahun mereka akan direhabilitasi disini, maka akan sesuai dengan kontrak tersebut, tapi kembali lagi ke kliennya mbak, jika semisal mereka cepat pulih maka tidak sesuai dengan kontrak juga gapapa, begitu juga sebaliknya, kalau semisal kontraknya satu tahun dan anaknya juga belum bisa kita keluarkan dari sini maka lewat dari masa kontrak juga gapapa” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

j). Penempatan Klien dalam Asrama

Pada tahap ini, mengikuti prosedur untuk mengungkapkan dan mengkonfirmasi masalah klien. Calon klien ditampung di tiga wisma, wisma reguler, yaitu wisma Khunti, Sembodro, dan Srikandi. Sedangkan untuk klien yang memiliki bayi di Wisma Bunda, untuk klien trauma di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), dan untuk klien gangguan jiwa berat di Wisma Drupadi. Klien akan didampingi selama satu tahun oleh pekerja sosial dan pegawai lainnya dalam melaksanakan program pelayanan.

“...kondisinya seperti apa, baik itu kesehatannya, psikologisnya, dari dimensi sosialnya, dan dari dimensi permasalahannya sendiri, itu di screening oleh mereka yang professional kalau kesehatan oleh dokter, pekerja sosial, konselor dan psikolog. Nantikan akan ditemukan kondisi PPKS itu. Kondisinya seperti apa, maka kalau dia perlu penanganan traumatic itu ada wisma trauma center itu tempatnya disitu, dan selama di trauma center itu ada upaya perlindungan baik perlindungan akan hak-haknya, maupun perlindungan dari ancaman dari luar” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 1 November 2024).

Pada tahap ini, setelah menyelesaikan prosedur pengungkapan dan verifikasi masalah klien. calon klien ditempatkan di tiga asrama kursus regular yaitu asrama khunti, sembodro, dan srikandi. Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) melayani klien trauma, Wisma Bunda melayani kursus untuk bayi, dan Wisma Drupadi melayani klien dengan penyakit mental serius. Pekerja sosial dan anggota staf lainnya akan mendampingi klien selama satu tahun saat mereka menjalankan program layanan.

## 2. Tahap Rehabilitasi Sosial

a). Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial

Bimbingan fisik yaitu keperluan yang dibutuhkan oleh klien selama di BPRSW. Pada tahap ini klien mendapatkan pelayanan meliputi sarana dan prasarana kesehatan,

olah raga, kebersihan untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan selama menjalani pelayanan. Makan dan minum gratis setiap harinya. Bimbingan mental diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada individu agar setiap klien dapat mengembangkan potensi dirinya. BPRSW memberikan bimbingan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing klien, bimbingan kedisiplinan agar klien tetap terorganisasi dan solid, bimbingan kepribadian, bimbingan kewirausahaan, bimbingan bahasa (Jawa dan Inggris), bimbingan kesehatan mental, pengasuh bayi, serta pengajaran seni budaya (musik, tari, dan karawitan). Bimbingan sosial merupakan bimbingan yang mencakup kegiatan sosial. Selain mereka yang dapat membantu dalam pengarahan ini, seperti pekerja sosial dan psikolog yang menawarkan advokasi, mediasi, konseling, perawatan individu dan kelompok, dan bantuan asrama, diharapkan klien memiliki kehidupan sosial yang positif.

“Yang perlu kita tingkatkan itu terutama kalo mereka berkarya, kita poser dulu perubahan perilakunya dulu aja karena walaupun mereka itu diberdayakan bagaimana kali perubahan dari dalam diri tidak bisa masih tetap sulit, jadi harus ada keinginan dan motivasi dari diri sendiri, ingin maju ingin ada perubahan, kalo masalah belajar keterampilan itu nomor dua dulu lah yang terutama perubahan sikap mental moral, sosial yang harus kita bentuk dulu, kalo itu sudah terbentuk insyaallah itu tidak akan sulit untuk memberdayakan mereka. Yang penting ada perubahan perilakunya dulu” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

“Kita melakukan perlindungan selama 24 jam, setelah adanya perlindungan ada namanya rehabilitasi sosial, kita lakukan sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2017, rehabilitasi sosial sesuai dengan praktek pekerja sosial itu minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan, kurun waktu itu kita rehabilitasi fisik, mental, sosial, keagamaan, dan kita bekali dengan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan mereka, dengan harapan secara psikis mereka pulih kembali tidak ada traumatis, secara permasalahan dia bisa menyesuaikan diri dengan masalahnya dia paham dengan masalahnya dan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kita membantu disini untuk memberi itu semuanya, secara sosial dia fungsi sosialnya akan naik dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, ini sesuai dengan visi BPRSW adalah mewujudkan wanita yang bermartabat, berakhlak dan mandiri, pemberdayaannya itu di mandirinya itu” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 1 November 2024).

#### b). Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan dirancang untuk membantu perempuan yang mengalami masalah sosial. Bimbingan keterampilan ini bertujuan untuk memberikan

keterampilan, keahlian, menambahkan *skill* dan kemampuan terhadap klien, guna mempermudah klien nantinya untuk mendapatkan pekerjaan atau membangun usaha sendiri. Hal ini memudahkan seluruh PPKS untuk menimba ilmu di bidang keahliannya masing-masing. Hal ini juga dapat memudahkan klien yang tidak cukup/kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya, dengan menggunakan keterampilan yang mereka miliki untuk bekerja. Adapun bimbingan keterampilan mencakup keterampilan batik, keterampilan menjahit, keterampilan salon, dan keterampilan olah pangan.

#### 1. Keterampilan Menjahit, Border dan Kerajinan Tangan

Bimbingan ini dilaksanakan setiap hari, dari hari senin sampai hari sabtu, untuk ruangan sementara ada di atas kantor BPRSW karena sebelumnya ada renovasi bangunan dan untuk saat ini sudah dipindahkan di samping asrama kunthi, dekat dengan gerbang masuk balai dan lebih tepatnya berada di samping ruang belajar klien lantai dua. Selain cukup besar dan lapang, ruang jahit dilengkapi dengan berbagai peralatan menjahit, termasuk mesin obras elektrik dan manual, alat peraga, dan segala sesuatu mulai dari mesin jahit kecil hingga besar yang dibutuhkan, termasuk AC, papan tulis, kursi, meja, dan perlengkapan lainnya.

Klien yang masuk dalam keterampilan ini mendapatkan bimbingan dari instruktur berdasarkan bidang keahliannya. Setiap hari, instruktur mengajarkan materi yang berbeda. Bagi pemula yang baru, akan dikenalkan tentang alat dan fungsinya, kemudian memulai tugas menjahit paling dasar. Pada keterampilan menjahit, setiap klien dapat menjahit seragam, kemeja, mukena bordir, baju pribadi, gaun, baju kantor. Selain keterampilan menjahit, para klien juga dibekali dengan keterampilan border dan kerajinan tangan seperti membuat gantungan kunci, membuat boneka, dan lain-lain. Sebelum mengikuti PBK, mereka diberikan tugas seperti membuat pakaian sesuai instruksi pekerja sosial.

Agar mereka dapat menjalankan semua tugas dengan efektif dan benar saat memasuki dunia kerja, para siswa juga diajarkan manajemen waktu dan teknik disiplin. Lulusan kursus ini telah memiliki kehidupan yang makmur dan mandiri sebagai desainer, pemilik butik, dan pekerjaan lainnya.



**Gambar 3.2 Ruang keterampilan  
Menjahit**



**Gambar 3.3 Hasil karya klien**

## 2. Keterampilan Tata Rias, Spa, dan Tata Rambut

Keterampilan ini berlangsung setiap hari, mulai dari senin hingga sabtu, dengan libur pada hari jumat dan minggu. Bagi klien yang mengikuti kelas ini kemudian dapat melanjutkan profesinya sesuai *passionnya*. Instruktur dipilih sebagai ahli di bidangnya masing-masing. PPKS yang mengikuti kelas pemula ini bisa mendapatkan kursus dasar dari *Hair First* seperti *creambath* dan potong rambut. Mereka belajar dari instruktur dengan pelajaran yang berbeda setiap harinya. Jam buka kursus pelatihan keterampilan ini dimulai dari pukul 09.30 hingga pukul 11.30. Selama waktu keterampilan, kelas akan berjalan sesuai dengan instruksi instruktur. Untuk cara kerja praktiknya, klien secara langsung praktik kepada teman-temannya sebagai model praktik mereka, sesuai dengan tahapan-tahapan yang diajarkan oleh instruktur. Hal ini dikatakan oleh L selaku klien yang ada di BPRSW berikut:

“....Nanti untuk jadi modelnya itu terkadang dari anak salon terkadang juga dari PPKS yang lain juga bisa mbak, yang penting ada modelnya gitu”

Dalam program keterampilan yang diselenggarakan oleh BPRSW Yogyakarta, pekerja sosial dan instruktur bekerja penuh untuk mengajarkan dasar-

dasar hingga praktik langsung, memfasilitasi segala bentuk keterampilan dengan alat yang sesuai dan memadai dengan tujuan agar klien dapat belajar secara maksimal selama proses rehabilitasi sosial di BPRSW Yogyakarta. . Partisipasi klien juga sangat baik pada saat proses pembelajaran, terbukti dengan banyaknya klien yang terus bertanya kepada instruktur setiap kali dia merasa tidak mengerti.

Melalui bekal program yang dilaksanakan selama rehabilitasi di BPRSW Yogyakarta, klien akan dapat hidup mandiri dan menciptakan sesuatu yang dapat dijual untuk meningkatkan perekonomiannya. Setelah menyelesaikan masa kontrak di BPRSW, klien sudah mampu dan memiliki keterampilan di segala bidang yang berhubungan dengan salon, seperti perawatan wajah, tata rias, spa, tata rias pengantin, dan pembuatan janur.



**Gambar 3.4 Ruang keterampilan Salon**



**Gambar 3.5 Hasil karya klien**

### 3. Keterampilan Olahan Pangan/Tata Boga

Kursus pengolahan makanan diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu, dan libur pada hari jumat dan minggu. Jam masuknya mulai pukul 09.30 pagi hingga pukul 11.30 siang. Instruktur di kelas olahan pangan ini berasal dari berbagai bidang, tergantung pada keahliannya. Kelas olahan pangan memperkenalkan masakan Indonesia dan internasional, meliputi masakan tradisional, masakan sehari-hari, dan masakan kelas hotel berbintang. Sebelum kegiatan memasak dimulai, para klien terlebih dahulu mendapat bimbingan dan penjelasan dari seorang instruktur. Setiap

klien wajib memiliki buku untuk mencatat semua bahan makanan yang diperlukan dan resep yang diperlukan untuk memasak.

Dalam teknik pengolahan makanan ini, klien juga belajar bagaimana membuat dan memproduksi produk makanan sesuai standar perdagangan dan nilai perdagangan. Peran instruktur dan pekerja sosial sangat penting agar klien dapat bekerja dan lebih semangat dalam belajar, dengan memfasilitasi alat-alat keterampilan sudah sangat lengkap dan menunjang kualitas klien.

BPRSW telah menyediakan persediaan makanan untuk semua kebutuhan, dan untuk peralatan memasak yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama mereka berbelanja sebelum memasak serta membeli barang-barang yang diperlukan berdasarkan jadwal mereka sendiri. Hasil dari masakan tersebut, mereka dievaluasi dan disajikan kepada pekerja kantor. Setiap dua minggu atau di akhir bulan, mereka mengevaluasi setiap yang diberikan instruktur kepada klien. Instruktur membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok dan memberi mereka tugas memasak untuk diselesaikan tanpa melihat buku resep atau bertanya. Tidak ada komunikasi sebelumnya, dan resep diberikan secara langsung. Klien akan dapat memulai pelatihan sendiri dan membandingkan hasil yang sebelumnya, dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari dua saja.



**Gambar 3.6 Ruang keterampilan Olahan Pangan**



**Gambar 3.7 Hasil karya klien**

#### 4. Keterampilan Batik

Kursus sebelumnya sama dengan kursus membuat ini. Sebelum beralih ke pelajaran intensif (konsentrasi) berikutnya, kelas ini ditujukan untuk pemula. Senin sampai Sabtu adalah hari di mana pelajaran membuat diadakan, sedangkan hari Jumat dan Minggu adalah hari libur. Pengajar kelas membuat sebanyak tiga guru yang berbeda tergantung pada bidang keahlian mereka masing-masing. Dalam kelas membuat untuk pemula, akan belajar cara menggambar dan melukis dengan cairan.

Setelah semuanya selesai, gambar tersebut diwarnai sesuai dengan warna yang diinginkan, kemudian jemur di bawah sinar matahari, tunggu hingga kering, terakhir rendam dalam air hingga warnanya keluar, dan terakhir jemur kembali di bawah sinar matahari.

Kelas membatik ditujukan untuk kelas pemula bagi klien reguler dan kelas aktivitas bagi klien kurang mampu yang memiliki gangguan mental dan dalam tahap pemulihan. Sasaran dari kursus ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan aktivitas sehari-hari yang dapat membantu mereka mencapai tujuan dengan menggunakan kemampuan mereka di masa mendatang.



**Gambar 3.8 Ruang keterampilan Membatik**



**Gambar 3.9 Hasil karya klien**

### 3. Tahap Resosialisasi

Tahap Resosialisasi merupakan layanan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk membantu klien beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Beberapa kegiatan digunakan selama tahap resosialisasi ini untuk membantu individu atau kelompok yang telah menerima pelayanan pemulihan psikososial agar dapat kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakatnya (Dokumentasi BPRSW Yogyakarta).

#### a). Bimbingan Pra Pemulangan

Pada tahap ini, setelah menyelesaikan bimbingan, klien menerima pembinaan sebelum kembali bergabung dengan keluarga dan masyarakat. Setelah meninggalkan BPRSW, pekerja sosial memberikan arahan, nasihat, dan pesan yang mungkin dapat diterapkan dikemudian hari, khususnya tentang apa yang diajarkan sebelumnya di BPRSW dan apa yang diterapkan di BPRSW. Harapannya, setelah dilakukan bimbingan, para klien tersebut mampu menjalani kehidupan setelahnya dan tentunya membawa perubahan yang positif bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, serta BPRSW.

“Kan dari awalnya kita sudah membekalinya dari keterampilan (soft skill), dari mulai nol sampai dia mampu. Jika dia sudah mampu, proses selanjutnya adalah dipraktek belajar kerjakan, diperusahaan atau di pengusaha. Misalnya keterampilan batik, jadi pengusaha batik bisa. Mereka mempraktekkan ilmunya yang didapat di BPRSW, seperti bagaimana menanggapi pelanggan, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana manajemen penjualannya, dan sebagainya. Artinya, itu sudah mulai pemberdayaan” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 1 November 2024).

#### b). Bimbingan Kesiapan dan Peran Serta dalam Masyarakat

Melalui upaya kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan sistem sumber daya. Klien diberikan bimbingan bagaimana mempersiapkan mental dan spiritual dalam berinteraksi sosial di masyarakat tempat mereka tinggal setelah keluar dari BPRSW. Untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan dan masyarakat, kita perlu melakukan perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya.

“Kita juga nanti akan terus bimbing mereka, kalau udah balik ke keluarga nanti jangan dengar apa yang tetangga omongkan, biar aja mereka ngomong apa, tapi jangan sampai kamu emosi” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 4 November 2024).

### c). Bimbingan Usaha/Kerja

Melalui program pembinaan usaha/kerja, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) didedikasikan untuk membantu perempuan, khususnya mereka yang mengalami tantangan sosial dan ekonomi serta untuk mengatasi tantangan mereka. Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan perempuan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan mencapai kemandirian finansial.

#### 1. Achievement Motivation Training (AMT)

Menyediakan informasi bisnis kepada klien dan dorongan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan usaha mereka setelah berakhirnya masa layanan.

“...mencari tau dulu dimana nantinya PPKS ini dipekerjakan, jika semisal udah ada tempat usaha yang mau menampung PPKS sesuai keterampilan yang mereka punya, maka akan kita adakan PBK (Praktek Belajar Kerja)” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 1 November 2024).

#### 2. Praktek Belajar Kerja (PBK)

Klien ditempatkan di berbagai pekerjaan sesuai dengan pelatihan keterampilan yang mereka dapatkan, dengan tujuan untuk memanfaatkan ilmu yang diperoleh dan meningkatkan semangat untuk bekerja atau menjadi wirausaha. PBK dilaksanakan selama 25 hari bekerja sama dalam kemitraan dengan berbagai bisnis yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta’

“Kan dari awalnya kita sudah membekalinya dari keterampilan (soft skill), dari mulai nol sampai dia mampu. Jika dia sudah mampu, proses selanjutnya adalah dipraktek belajar kerjakan, diperusahaan atau di pengusaha. Banyak tempat-tempat yang akan kita jadikan tempat belajar PPKS nantinya, mereka diberi pekerjaan sementara disana, untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah mereka

dapatkan disini” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 1 November 2024).

### 3. Sertifikasi Alumni

Bagi lulusan BPRSW, pendalaman keterampilan terstandarisasi dimaksudkan sebagai bukti sertifikasi keterampilan yang diakui. Dengan harapan, sertifikat ini dapat membantu klien dalam memulai karir. Sertifikasi dilakukan selama dua bulan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang diakui di wilayah DIY. Alumni yang berhasil menyelesaikan program sertifikasi menerima bantuan stimulan bergantung pada keahlian mereka.

“Sertifikasi ini nanti menjadi bukti mereka bahwasannya mereka sudah melaksanakan kegiatan PBK, nahh dengan sertifikat ini mempermudah PPKS juga untuk mencari pekerjaan, karena sudah terbukti dengan praktek ditempat usaha” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 1 November 2024).

### 4. Penyaluran

#### a. Penempatan kerja/magang

Klien melanjutkan PBK setelah satu tahun berlalu. Sesuai dengan bidang keterampilannya, pekerja sosial dan BPRSW akan membantu klien dalam memilih lokasi PBK. BPRSW juga mendampingi klien yang PBK dalam pemberangkatan menuju lokasi. Selama PBK, klien tetap berada di bawah tanggung jawab BPRSW dan keseharian serta aktivitasnya juga diawasi oleh BPRSW. Selain itu, klien yang menyelesaikan PBK akan mendapat bantuan dari BPRSW terkait ketenagakerjaan. Namun, hal ini bergantung pada mereka apakah klien mencari pekerjaan sendiri atau dicarikan. Sebab, menurut pengalaman beberapa lulusan PBK, klien mendapat tawaran pekerjaan dan terdapat lowongan pekerjaan di lokasi PBK tersebut.

“Walaupun yang bekal bukan kita tapi perusahaan atau pengusaha, tapi mereka akan mengambil intri point nya. Caranya memanage supaya laku itu seperti ini, periklan, menghubungi pelanggan itu seperti ini, menarik pelanggan seperti ini dan lain sebagainya. Setelah ini selesai,

maka nanti ada penilaian dari perusahaan atau pun pengusaha itu. Misalnya, kemampuannya sudah bagus, cukup, kurang ini menjadi tolak ukur kita (BPRSW)” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 6 November 2024).

b. Usaha Mandiri

Pada tahap ini, klien yang berhasil menyelesaikan PBK diberikan tunjangan awal atau modal untuk membantu membangun usaha mereka. Diharapkan para klien dapat mandiri dan memulai usaha mereka sendiri.

“Setelah mereka bekerja ke orang, artinya dia tidak membuat usaha sendiri (pekerja) tapi tolak ukurnya adalah mereka mampu bekerja dan mampu menghasilkan uang. Tapi jika dia tidak bekerja dengan orang pasti akan buka usaha sendiri. Link dengan berbagai sumber tadi untuk pemberdayaan mereka (PPKS)” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 6 November 2024).

c. Pemberian bantuan stimulan (jika tersedia)

Pada tahap ini, lembaga yang bekerja sama dengan BPRSW dalam acara sertifikasi alumni BPRSW memberikan dukungan kepada klien. Jika ada bantuan, acara ini diselenggarakan setiap tahun. Tergantung pada kelas konsentrasi atau bidang keterampilan, ada beberapa jenis bantuan yang diberikan. Misalnya, keterampilan menjahit, termasuk perlengkapan menjahit, mesin jahit, mesin jahit obras, dan lain-lain. Begitu pula untuk kelas keterampilan lainnya.

“PPKS ini kita lanjutkan rehabilitasinya di BPRSW atau tidak. Biasanya kebanyakan itu sudah mampu dan bagus, setelah itu kita pulangkan. Pemberdayaan kita dari BASNAZ, CSR, Kemensos dan lain-lain. Jika nanti alumni sudah memiliki pekerjaan makan akan diberi bantuan stimulan untuk alumni” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 6 November 2024).

#### **4. Tahap Bimbingan Lanjut**

Klien yang telah menyelesaikan Praktik Belajar Lapangan (PBK) akan dipantau selama 25 hari oleh Departemen Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) BPRSW Yogyakarta pada tahap bimbingan lanjutan. Selain PRS, pekerja sosial bertanggung

jawab untuk memberikan tindak lanjut dan pembimbingan selama enam bulan kepada klien yang telah lulus dari BPRSW Yogyakarta. Bimbingan ini mencakup bimbingan untuk meningkatkan kehidupan sosial klien, bimbingan untuk menemukan bisnis klien, dan dukungan atau bantuan dalam pengembangan bisnis. Bimbingan lanjut dilakukan melalui penyuluhan, kunjungan rumah, reunion, rujukan sebagai tindak lanjut pencegahan kerentanan, kemudian dengan bantuan stimulan dan terakhir evaluasi.

Kegiatan temu alumni juga sangat penting untuk memberikan informasi mengenai lowongan. BPRSW Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan temu alumni ini pada saat kegiatan sertifikasi sedang berlangsung. Lulusan BPRSW Yogyakarta akan diundang dalam acara tersebut dan akan berbagi pengalaman yang didapat setelah lulus dari balai tersebut. Selain itu, kegiatan monitoring juga dilakukan BPRSW Yogyakarta untuk memantau apakah bantuan tersebut digunakan dengan baik atau malah digunakan untuk hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pemberdayaan.

“Hubungan masih saling memberikan informasi, kita ada monitoring dan evaluasi pasca terminasi (penghentian pelayanan di balai). Kita kembalikan kepada keluarga, jika tidak ada keluarga kita carikkan tempat kerja dan sebagainya. Hasil monitoring itu akan diperoleh data kalo mereka sudah mandiri, sudah bekerja itu memang tujuan kami, yang belum kita link kan dengan berbagai sumber yang ada diluaran sana, misalnya basnaz, permensos, dan CSR. Walaupun mereka sudah terverifikasi atau belum itu tetap kita monitoring dan evaluasi sehingga walaupun sudah alumni masih ada hubungan dengan kami. Karena untuk mengukur kemandirian itu tidak sebentar, kadang-kadang sekarang setelah lulus dia bekerja, mungkin saja di PHK atau diputus hubungan kerjanya dan nganggur lagi” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 4 November 2024).

## **5. Tahap Terminasi**

Tahap terminasi adalah tahap akhir dalam pencatatan kasus klien dan hubungan kerja pelayanan (kontrak) sudah ditutup (selesai). BPRSW Yogyakarta sudah tidak ada hak dalam membimbing mengenai keterampilan, pengajaran psikologi dan seluruh kegiatan pembelajaran di BPRSW Yogyakarta. Tahap terminasi dilakukan ketika

lulusan BPRSW Yogyakarta telah menyelesaikan praktik kerja lapangan, mendapatkan sertifikasi dan telah mempunyai pekerjaan yang dapat meningkatkan perekonomian dan mengembangkan keterampilan/*skill* yang ada pada diri mereka. Melihat perkembangan tersebut, maka kontrak diakhiri dan klien akan dikembalikan ke keluarganya sehingga ia dapat hidup bermasyarakat seperti masyarakat lainnya.

Walaupun klien sudah tidak mengikuti kegiatan pemberdayaan yang ada di BPRSW lagi, akan tetapi pihak balai masih memonitoring pasca terminasi, guna untuk melihat perkembangan dan kemandirian klien. Hal ini disampaikan oleh Bapak Widiyanto selaku kepala Balai PRSW Yogyakarta:

“Hubungan masih saling memberikan informasi, kita ada monitoring dan evaluasi pasca terminasi (penghentian pelayanan dibalai). Kita kembalikan kepada keluarga, jika tidak ada keluarga kita carikkan tempat kerja dan sebagainya. Hasil monitoring itu akan diperoleh data kalo mereka sudah mandiri, sudah bekerja itu memang tujuan kami, yang belum kita link kan dengan berbagai sumber yang ada diluaran sana, misalnya basnaz, permensos, dan CSR. Walaupun mereka sudah terverifikasi atau belum itu tetap kita monitoring dan evaluasi sehingga walaupun sudah alumni masih ada hubungan dengan kami. Karena untuk mengukur kemandirian itu tidak sebentar, kadang-kadang sekarang setelah lulus dia bekerja, mungkin saja di PHK atau diputus hubungan kerjanya dan nganggur lagi”.

## **b. Metode dan Teknik Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta**

Pemberdayaan klien merupakan fungsi utama Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) di Yogyakarta. BPRSW menggunakan berbagai metode dan teknik untuk membantu klien mengatasi trauma, menjadi lebih mandiri, dan membangun kemampuan mereka sehingga dapat berkontribusi dengan masyarakat dengan baik. Dari kasus yang dikaji dalam penelitian ini, metode dan teknik yang digunakan pastinya berbeda-beda, sebagai berikut:

### **1. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, teknik pemberdayaan dimulai dengan pendekatan konseling, menawarkan layanan terapi kepada korban untuk membantu mereka memahami masalah mereka dan menemukan solusi. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk membantu korban memulihkan trauma psikologis,

termasuk PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Untuk meningkatkan dinamika hubungan dan membantu korban dalam menghadapi situasi yang menantang, konseling ini juga melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan/pemulihan.

“Dia memang tidak bisa mbak kalo sudah pembelajaran KDRT itu, langsung kumat penyakitnya, karena mungkin dia masih teringat dan trauma” (Ibu Herawati, wawancara tanggal 6 November 2024)

Dengan pendekatan konseling, BPRSW memberikan perhatian individual kepada setiap klien sembari menggunakan metode penanganan kasus sosial untuk membantu mengidentifikasi masalah. BPRSW memberikan pelatihan keterampilan praktis seperti memasak atau keterampilan lain yang dapat membantu klien menjadi lebih mampu secara ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat mandiri secara finansial setelah keluar dari situasi kekerasan. Klien juga diberikan bimbingan psikologis dan emosional yang mereka butuhkan untuk pulih dari kekerasan yang mereka alami. Selain itu, BPRSW memberikan pendampingan hukum kepada klien selama proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi klien dari pelaku kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan ini, BPRSW tidak hanya menyembuhkan trauma tetapi juga memberdayakan perempuan agar dapat berkontribusi di masyarakat dengan cara sebaik mungkin.

## 2. Perdagangan Manusia

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) yang berpusat di Yogyakarta menggunakan sejumlah teknik untuk memberdayakan korban perdagangan manusia, khususnya perempuan. Salah satu metode utama yang digunakan untuk membantu klien mengatasi trauma psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman mereka adalah konseling psikososial. Untuk memenuhi kebutuhan setiap klien, layanan ini ditawarkan secara eklektik dengan memadukan pendekatan konseling humanistik dan perilaku. Selain itu, BPRSW menawarkan dukungan kesehatan mental yang bertujuan untuk memberikan korban rasa aman dan nyaman sehingga mereka dapat berterus terang dan terlibat aktif dalam proses pemulihan. Hal ini dilakukan untuk membantu klien bangkit dari pengalaman masa lalu mereka dan membangun masa depan yang lebih baik.

“Setiap klien itu sudah ada jadwal konseling nya mbak, untuk kasus human trafficking, konseling dengan psikolog agar tau peningkatan mereka bagaimana, masalah yang mereka alami hari ini apa” (Ibu Herawati, wawancara tanggal, 6 November 2024).

### 3. Kemiskinan

Dengan fokus pada peningkatan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) di Yogyakarta menggunakan sejumlah teknik untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Salah satu tujuan utama pendidikan nonformal adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kliennya, khususnya melalui keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, membatik, dan salon. Selain itu, BPRSW memberikan bimbingan sosial, dengan pekerja sosial yang berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk membantu masyarakat mengidentifikasi potensi mereka dan mengembangkan program pemberdayaan yang berhasil. Dalam pendekatan pemberdayaannya, BPRSW menggunakan model kelompok usaha bersama (KUBE), yang mempromosikan kerja sama masyarakat dalam manajemen usaha kecil. Konsep ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berwirausaha tetapi juga memperkuat jaringan sosial di dalam perusahaan. Metode ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari mengidentifikasi potensi diri hingga mencapai kemandirian finansial. BPRSW sangat berkontribusi dalam hal ini guna untuk menilai efektivitas program dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

#### c. Materi Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta

Pemberdayaan perempuan sangat dibantu oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. Oleh karena itu, BPRSW memberikan berbagai kegiatan agar para klien tidak merasa bosan. Klien secara konsisten mengikuti pembelajaran kelas tentang berbagai subjek yang beragam, termasuk pendidikan tentang bahasa dan budaya Jawa, motivasi, perilaku dan etika, pendidikan bahasa Inggris, agama, kesehatan mental, disiplin atau kesadaran hukum, bantuan kesehatan atau medis, konseling kesehatan, manajemen keluarga, konseling kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan dan anak, dan kewirausahaan. Selain bimbingan belajar, BPRSW juga membimbing klien dalam kegiatan keterampilan.

Seperti keterampilan membuat batik, program ini menawarkan kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan baru sambil memperoleh keterampilan yang dapat mengarah pada prospek baru di industri kreatif dan bidang kerajinan. Mereka menerima instruksi dalam membuat shibori, jumputan, ciprat, batik tulis, dan kerajinan lainnya.

Keterampilan olah pangan bertujuan untuk memberi mereka keterampilan yang berguna yang akan meningkatkan kemandirian dan prospek pekerjaan mereka. Program ini juga berupaya untuk mendidik peserta tentang nilai kreativitas, kebersihan, dan nutrisi dalam menciptakan produk makanan berkualitas tinggi. Mereka diajarkan berbagai keterampilan pengolahan makanan, termasuk cara menyiapkan masakan tradisional, makanan restoran, makanan untuk cuci mulut, dan makanan lezat lainnya. Melalui pendekatan yang komprehensif, program ini berupaya untuk membantu klien dalam pemulihan fisik dan mental mereka dengan memberikan bimbingan tentang keterampilan tata rias dan salon. Selain memberikan pembelajaran langsung, program ini mempromosikan perawatan diri dengan mengajarkan peserta keterampilan kecantikan seperti aplikasi kosmetik, penataan rambut, manikur, dan pedikur.

Tujuan dari program rehabilitasi keterampilan menjahit adalah untuk membantu klien dalam pemulihan dengan mengajarkan mereka cara menjahit. Diyakini bahwa dengan berpartisipasi dalam program ini, para klien mampu meningkatkan keterampilan praktis, memulihkan kepercayaan diri mereka, dan membuka jalan baru untuk masa depan yang lebih baik. Mereka diajarkan teknik menjahit yang beragam mulai dari membuat desain hingga memproduksi barang jadi. Diharapkan dengan menggunakan bakat yang beragam ini, klien mampu menguasai konsep yang disajikan di kelas dan mencapai potensi penuh mereka. Selain pembelajaran ini, BPRSW juga memberikan bakat seni seperti tari dan karawitan. Klien belajar tentang seni yang merupakan warisan budaya dan bagaimana melestarikannya bagi generasi muda. Belajar karawitan merupakan salah satu bentuk pengembangan kepribadian, karena belajar karawitan membutuhkan kesabaran, ketekunan, keseriusan, dan kepekaan. Klien yang mempelajari bakat ini diajarkan tari tradisional yang merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang.

“Karawitan juga termasuk pemberdayaan, dengan menginternalisasi budaya jawa, nari, dan mengolah bakat mereka seperti pembawa acara, jika suatu saat menjadi MC” (Bapak Widiyanto, wawancara tanggal 6 November 2024).

### **C. Hasil Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta**

Hasil dari program pemberdayaan ini menunjukkan peningkatan keterampilan dan dorongan bagi perempuan untuk berwirausaha. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan mental dan sosial klien, yang sangat penting dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Dengan adanya bimbingan keterampilan, sosial, dan mental telah tercapainya motivasi bagi klien untuk berwirausaha, serta pemahaman klien atas manajemen waktu dan diri mereka. BPRSW Yogyakarta merupakan tempat bagi klien untuk belajar hal-hal baru. Klien benar-benar memahami teori yang mereka pelajari di kelas melalui latihan keterampilan secara langsung. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di BPRSW Yogyakarta, klien merasa lebih percaya diri dan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain.

Dalam mengikuti bimbingan fisik, mental dan sosial dapat membuat klien berani dan percaya diri ketika kembali ke lingkungannya. Melalui tahap monitoring psikologi, klien tidak akan kembali trauma dengan masalah yang dialami sebelumnya. Peran pekerja sosial dan psikolog juga sangat penting bagi klien, karena proses motivasi sehari-hari mendorong mereka untuk mandiri. Dengan kegiatan motivasi ini akan membuat klien merasa nyaman selama di BPRSW Yogyakarta. Beragamnya pembelajaran yang ditawarkan di BPRSW juga dapat membuat klien semangat dan tidak bosan selama berada di balai. Kegiatan pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas namun terkadang menggunakan media film membuat klien lebih senang dan antusias. Selain itu, kehadiran instruktur eksternal seperti Puskesmas dan pihak kepolisian juga membuat klien senang mengikuti kelas.

Melalui kegiatan keterampilan di BPRSW Yogyakarta, klien akan menjadi mandiri. Kegiatan keterampilan yang dilakukan BPRSW Yogyakarta merupakan kegiatan yang sangat penting bagi klien. Melalui kegiatan keterampilan, klien memahami bagaimana menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual. Pemberdayaan klien melalui kegiatan keterampilan di BPRSW Yogyakarta berarti klien tidak hanya memiliki pengetahuan umum, namun juga dapat belajar bagaimana menciptakan

pekerjaan atau membuat sebuah karya yang dipasarkan secara luas. Dan menambah pengalaman klien sehingga dapat menjadikannya bekal terhadap diri mereka setelah lulus dari BPRSW Yogyakarta.

Bentuk pengembangan program bimbingan keterampilan bagi para klien di BPRSW Yogyakarta yaitu melalui field study, PKL/PBK, dan sertifikasi alumni. Field study merupakan kegiatan kunjungan ke tempat pelaku usaha yang bertujuan untuk memotivasi dan menambah wawasan klien dalam mengembangkan ilmunya dibidang keterampilan yang mereka ambil agar pengetahuan yang dimiliki tidak hanya sebatas dari instruktur saja. Melalui kegiatan field study, klien dapat mengetahui dan mempelajari tentang apa yang dibutuhkan pada zaman saat ini. Misalnya di keterampilan menjahit, klien dapat mempelajari tentang model-model desain baju yang terbaru dan unik untuk masa kini. Kunjungan field study ke tempat usaha klien atau alumni yang telah berhasil membangun usaha sendiri dapat memberikan pengalaman berharga dan target masa depan bagi klien lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Widiyanto tanggal 1 November 2024.

“Membuka usaha sendiri atau dia mampu memasuki lapangan pekerjaan. Artinya dia mempekerjakan orang lain (membuka lowongan untuk orang lain), itu termasuk hasil dari pemberdayaan itu. Kadang orang itu belum tentu bisa merintis usaha sendiri, katakanlah “ah saya bekerja diorang lain saja, untuk sementara”. Kadang-kadang yang penjahit terutama, mereka bekerja ke modister (penjahit), akan tetapi di rumah mereka juga menerima jahitan dari tetangga, saudara, teman-teman mereka dan lain sebagainya, jadi dia berusaha sebagai tenaga kerja dan juga membuka usaha sendiri”.

Program PKL/PBK dari BPRSW dilaksanakan selama 1 bulan. Klien yang telah diizinkan untuk mengikuti PKL/PBK akan ditempatkan di pelaku usaha dengan tujuan agar dapat mempraktekkan ilmunya. Klien tidak hanya melihat dan mendengar teori-teori saja, tetapi juga belajar menerapkan langsung apa yang dilihat dan dipahaminya. Melalui proses pembelajaran seperti itu, klien tidak hanya memperoleh keterampilan, namun juga mengalami perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap pekerjaan.

Bagi lulusan BPRSW, program sertifikasi merupakan pengembangan keterampilan terstruktur diakui dengan adanya sertifikat. Dengan harapan sertifikat ini membantu kline untuk memperoleh pekerjaan atau bisnis. Bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang diakui di wilayah DIY, sertifikasi akan dilakukan selama dua bulan. Lulusan yang berhasil menyelesaikan proses sertifikasi berhak mendapatkan bantuan stimulan sesuai dengan keahlian mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Widiyanto tanggal 1 November 2024.

“.....kita ada monitoring dan evaluasi pasca terminasi (penghentian pelayanan dibalai). Kita kembalikan kepada keluarga, jika tidak ada keluarga kita carikkan tempat kerja dan sebagainya. Hasil monitoring itu akan diperoleh data kalau mereka sudah mandiri, sudah bekerja itu memang tujuan kami, yang belum kita link kan dengan berbagai sumber yang ada diluaran sana, misalnya basnaz, permensos, dan CSR”

Meningkatkan kewirausahaan menunjukkan bahwa sebagian klien sudah mempunyai keinginan dan ambisi untuk menjadi wirausaha dan ada pula yang belum. Harapan dan cita-cita klien pada umumnya bercita-cita berwirausaha di bidang keterampilan menjahit, salon, olahan pangan, dan batik adalah membuka usaha sendiri yang berkualitas dan berkembang pesat serta menyelesaikan berbagai tugas dengan semangat.

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN**  
**REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA**

**A. Analisis Proses Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta**

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita merupakan salah satu tempat yang memberikan penanganan bagi perempuan di Yogyakarta serta pelaksana teknis Dinas Sosial dalam pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*Human Trafficking*). Di balai tersebut, mereka yang mengalami kasus menerima pelatihan dan keterampilan yang akan membantu mereka di kemudian hari dalam mencari pekerjaan yang layak.

Berdasarkan data perempuan korban kekerasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup memprihatinkan dan tidak terlepas dari permasalahan. Untuk mengurangi masalah ini, harus diidentifikasi dan pelaku dihukum. Maka, hukum Islam sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab. Jumlah pelayanan kasus di BPRSW Yogyakarta ada 5. Pertama, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, perempuan yang mengalami kekurangan dari segi finansial atau tidak mampu, sehingga putus sekolahnya dan rela hidup dijalan. Kedua, Korban Kekerasan Fisik dan Psikis, perempuan yang mengalami tindak kekerasan seperti KDRT, pemerkosaan dan lain sebagainya. Ketiga, Wanita Tuna Susila, perempuan yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan imbalan. Keempat, Korban Human Trafficking (Perdagangan Manusia), perekrutan, pengangkutan, dan pemindahan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan dan bentuk penculikan lainnya dengan tujuan eksploitasi. Dari eksploitasi seksual, pelayanan paksa, serta perbudakan atau pengambilan organ tubuh. Kelima, Pekerja Migran, perempuan yang bekerja diluar negeri untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Akan tetapi, kebanyakan orang Indonesia bekerja diluar negeri yang disebut

sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dari jumlah kasus tersebut yang sudah ditangani sampai bulan September 2024 ini sebanyak 69 orang dengan target penanganan 70 orang sampai akhir Desember 2024. Menurut Kepala Balai PRSW Yogyakarta target ini dapat dicapai dengan sepenuhnya. Untuk mencapai target tersebut, perlu adanya pemberdayaan dalam mengatasi masalah sosial, khususnya perempuan.

Pemberdayaan perempuan, menurut Karl (1995) adalah suatu proses peningkatan kesadaran dan keterlibatan dalam perubahan (*transformative action*) dan pengambilan keputusan sehingga perempuan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Sadli (1991) (Hasanah, 2015: 76), ketika perempuan memiliki aktivitas ekonomi dan pendapatan, maka perempuan cenderung menjadi lebih mandiri. Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan perempuan adalah suatu usaha untuk memberikan kemampuan kepada perempuan agar mampu mandiri ketika dihadapkan pada pilihan dan mampu mengambil keputusan sendiri.

Pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta bertujuan agar perempuan mandiri dan memiliki kemampuan sesuai potensi yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan motto BPRSW Yogyakarta yaitu “Wanita Bakoh Mandiri” Bermartabat, Adiluhung, Kuat, Optimis, Harmonis, Mapan, Dinamis, dan Religius”. Dilihat dari kondisi lingkungan kelurahan Cokrobedog ini memungkinkan untuk klien agar hidup mereka tenang karena jauh dari keramaian, walaupun terkadang merasa jenuh dan bosan, mereka tetap menjalankan segala kegiatan yang ada di BPRSW Yogyakarta dengan baik dan penuh semangat. Ditambah adanya kegiatan lain seperti menari dan karawitan, kegiatan ini dapat menjadikan klien lupa terhadap masalah yang mereka hadapi. Terkait dengan klien perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di BPRSW Yogyakarta bisa diklasifikasikan menjadi 3 kasus. Dari 3 kasus tersebut, menurut hemat peneliti bahwa klien kasus KDRT mereka benar-benar mendapatkan kekerasan psikis. Hal ini ditandai dengan pendapat Bapak Widiyanto yang menyatakan bahwa kekerasan psikis mempunyai tanda-tanda, antara lain klien merasa takut, hilangnya rasa percaya diri dan percaya terhadap pasangan, serta menderita psikis berat.

Tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Soekanto dalam Dedeh & Ruth (2019: 14), pemberdayaan terbagi dalam tujuh tahapan, yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program atau kegiatan, pemformalisasi rencana aksi, implementasi program atau kegiatan, evaluasi, dan terminasi. Melihat data pada BAB III, proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta melalui lima tahapan. Dengan beberapa tahap ini, proses pemberdayaan perempuan di BPRSW membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini dilakukan agar terwujudnya program pemberdayaan yang efektif.

#### **a. Analisa Tahapan dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta**

Berikut analisa peneliti dalam tahap pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan BPRSW Yogyakarta:

##### **1. Tahap Sosialisasi, Penjangkauan, dan Penerimaan Klien**

Pada tahap ini, koordinasi dilakukan dengan kota atau kabupaten yang menjadi kewenangan BPRSW, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangkauan ini didasari dengan adanya sosialisasi di berbagai wilayah, jika ada masyarakat yang sesuai dengan kriteria, maka akan ditindak lanjuti.

Sebelum melaksanakan sosialisasi, perlu adanya persiapan yaitu dengan dilakukannya koordinasi dengan wilayah yang ada di kabupaten atau kota sesuai jangkauan BPRSW. Hal ini menunjukkan tercapainya tujuan dan target yang jelas sebelum melaksanakan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan melalui pertemuan bersama masyarakat setempat yang ditujukan untuk BPRSW sesuai dengan standar yang ada. Selain sosialisasi dimasyarakat, BPRSW juga memanfaatkan teknologi guna menyebar pamflet tentang BPRSW. Dalam persiapan sosialisasi bersifat kondisional menyesuaikan kebutuhan. Jika memungkinkan didalam ruangan ataupun ruangan terbuka maka bisa menggunakan fasilitas yang ada di desa tersebut. Sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, pihak BPRSW Yogyakarta, perangkat desa yang ada

di Daerah Istimewa Yogyakarta serta gerakan-gerakan yang membantu pihak BPRSW dalam mengatasi permasalahan sosial.

Jika memungkinkan ada masyarakat yang sesuai kriteria, maka pihak pemerintah desa harus segera melaporkannya, karena kasus mereka akan ditindak lanjuti dengan pihak yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan. Sebelum masuk ke BPRSW mereka juga diberi motivasi agar mereka bisa menerima masalah yang telah mereka dapatkan. Begitu juga mereka akan diidentifikasi guna untuk mencari tau secara rinci tentang calon klien, kemudian diseleksi apakah calon klien dilatar belakangi dari keluarga kurang mampu dan mereka memiliki kemauan untuk menjalankan kegiatan yang ada di BPRSW. Jika calon klien menerima mereka ditempatkan di BPRSW, maka akan dijelaskan lebih mendalam lagi terkait program pemberdayaan dan rehabilitasi apa saja yang akan mereka laksanakan selama berada di BPRSW. Untuk penempatan asrama dibagi menjadi 3, yaitu sesuai dengan kasus yang mereka alami. Asrama Kunthi, Sembodro, dan Srikandi ditempatkan untuk program regular dengan kriteria kasus perempuan dari rumah tangga yang tidak harmonis (*broken home*), perempuan yang putus sekolah, dan perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semuanya rentan secara sosial ekonomi. Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) menerima kasus perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual, pelacuran, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, pekerja migran yang memiliki masalah sosial, atau korban perdagangan manusia. Wisma Bunda dengan kriteria kasus Wanita dengan kehamilan tidak dikehendaki (*hamil diluar nikah*).

Berdasarkan realita yang ada dan menurut hemat peneliti, bahwa sosialisasi yang dilakukan BPRSW Yogyakarta sudah sesuai dengan upaya maksimal. Hasil ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto (2010) bahwa sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan budaya kepada anggota masyarakat baru. Secara umum (dalam Sari: 2009), sosialisasi

diartikan sebagai proses penanaman adat istiadat, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Banyak orang menyebut sosialisasi sebagai teori peran (*role theory*), sehingga peran yang harus diemban oleh seorang individu disampaikan selama proses sosialisasi.

## 2. Tahap Rehabilitasi Sosial

Sistem perencanaan program BPRSW Yogyakarta dilakukan dengan *top down approach*, dengan pedoman yang diturunkan dari pusat ke lembaga. Pada tahap perencanaannya, program-program BPRSW Yogyakarta disediakan oleh Kementerian Sosial dan disesuaikan dengan konteks Yogyakarta oleh Dinas Sosial Yogyakarta, dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di BPRSW Yogyakarta. Program akan berhasil jika direncanakan dengan baik. BPRSW Yogyakarta memiliki anggaran untuk melaksanakan program rehabilitasi, dan perencanaan ini terkait erat dengan anggaran program itu sendiri. Kementerian Sosial menyediakan program BPRSW Yogyakarta, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan BPRSW Yogyakarta dan Dinas Sosial Yogyakarta.

Dalam proses rehabilitasi sosial, BPRSW melibatkan banyak pemangku kepentingan yang dapat mendampingi dan mengadvokasi klien untuk mencari solusi terbaik, terutama melalui kegiatan *case conference*. *Case conference* adalah pertemuan para profesional untuk membahas suatu kasus yang berkaitan dengan penanganan atau penyelesaian masalah klien. *Case conference* dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah *case conference* dimana pengambilan keputusan dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi klien, dan kedua adalah *case conference* untuk membantu mencari solusi bagi klien yang mengalami perilaku kekerasan.

Pada tahap ini klien diberi beberapa bimbingan guna untuk meningkatkan dan merubah perilaku mereka. Pada bimbingan fisik, klien mendapatkan binaan seperti kesehatan, olahraga, pemenuhan semua kebutuhan seperti sandang, pangan, serta tempat tinggal pelayanan secara

gratis. Dengan adanya rehabilitasi sosial dapat memulihkan keadaan seperti semula. Oleh karena itu, rehabilitasi dilakukan untuk membantu klien agar dapat kembali seperti masyarakat normal lainnya. Bimbingan mental seperti bimbingan keagamaan sesuai dengan agama klien masing-masing, bimbingan seni budaya, bimbingan bahasa (Jawa dan Inggris), bimbingan kedisiplinan agar klien dapat diatur dengan baik. Bimbingan sosial dengan harapan klien dapat bersosialisasi dengan baik, seperti pendampingan pekerja sosial dan psikolog. Bimbingan keterampilan untuk menambah skill dan kemampuan klien, agar setelah lulus dari BPRSW mereka mudah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Kelas keterampilan dibagi menjadi 4 kelas yaitu, keterampilan menjahit, batik, salon, dan olahan pangan.

Menurut hemat peneliti, rehabilitasi sosial yang dilakukan BPRSW Yogyakarta sudah masuk pada tahap maksimal, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Umum (KUHP), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 23, rehabilitasi adalah hak untuk memulihkan kemampuan, kedudukan serta martabat seseorang yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum (Pahlevi, 2019).

### 3. Tahap Resosialisasi

Dalam tahap resosialisasi ini, BPRSW Yogyakarta menggunakan berbagai metode untuk mempersiapkan kliennya agar dapat kembali ke masyarakat. Program *Achievement Motivation Training* (AMT) bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang usaha dan menginspirasi klien untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaannya. Mengintegrasikan klien ke dalam masyarakat memerlukan pendekatan sosial yang mendampingi dan mendukung klien dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya. Hal ini dapat dicapai dengan berpartisipasi klien dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pengabdian masyarakat dan lain sebagainya guna untuk meningkatkan partisipasi sosial di masyarakat.

Sasaran dari tahap layanan rehabilitasi ini adalah untuk membantu individu agar terbiasa dengan lingkungan sosialnya. Secara khusus, semua kegiatan yang telah mereka ikuti di BPRSW dapat digunakan di masyarakat. Mereka mampu bersosialisasi dengan baik dan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Bimbingan usaha atau kerja dengan menempatkan klien di berbagai tokoh usaha. Misalnya menjahit, mereka akan ditempatkan di tempat usaha tersebut dengan tujuan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah mereka peroleh dari instruktur. Menurut peneliti, resosialisasi yang dilakukan BPRSW Yogyakarta sudah maksimal sesuai dengan teori Erving Goffman, rehabilitasi dilakukan melalui institusi. Institusi ini merupakan institusi total berdasarkan konsep Erving Goffman. Institusi total dalam sosiologi termasuk dalam pembahasan sosialisasi bagi penyandang masalah sosial. Karena perannya sebagai mediator sosialisasi, institusi total mempunyai fungsi penting bagi masyarakat. Menurut Goffman, institusi total adalah tempat kerja dimana banyak orang bersatu dan terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu yang lama.

#### 4. Tahap Bimbingan Lanjut

BPRSW Yogyakarta melakukan bimbingan lanjut untuk membantu klien dalam meningkatkan kehidupan sosial dan keterampilannya setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Tahap ini mencakup pemantauan kemampuan klien, termasuk menilai kemajuan dalam penerapan keterampilan yang diperoleh. Selain itu, alumni yang menunjukkan komitmen terhadap bidang keahliannya dipilih untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka dan mendapatkan pengakuan resmi melalui sertifikat kerja. Program bimbingan lanjut ini tidak hanya berfokus pada aspek kompetensi, namun juga mencakup motivasi dan pengakuan agar alumni tetap produktif. Selain itu, dilakukan penilaian awal dan lanjutan untuk

menilai kesiapan klien mengikuti tahap pasca rehabilitasi meliputi aspek psikologis, sosial, dan keterampilan.

Berdasarkan realitas yang ada, pelaksanaan tahapan bimbingan lanjutan ini dikategorikan menurut pendapat Soekanto dalam Dede & Ruth (2019:13) bahwa pengawasan dari BPRSW Yogyakarta terhadap kliennya selama bimbingan lanjut berjalan dengan baik dan pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan pekerja sosial.

#### 5. Tahap Terminasi

Tahap akhir ini merupakan tahap penutupan masa kontrak atau penutupan pencatatan kasus terhadap pelayanan klien. Persiapan pada tahap terminasi yang dilakukan oleh BPRSW Yogyakarta mencakup beberapa langkah penting untuk memastikan alumni berhasil melakukan transisi menuju hidup mandiri setelah selesai rehabilitasi. Tahap terminasi terjadi setelah klien ditetapkan telah menyelesaikan program. Termasuk menutup layanan pencatatan kasus dan mengakhiri layanan kontrak. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek rehabilitasi telah tercapai dan klien merasa siap untuk terus hidup mandiri. Pada tahap ini, pekerja sosial memberikan motivasi dan penilaian akhir kepada klien dan membantunya menginternalisasi pengalaman positif yang diperoleh selama di BPRSW Yogyakarta. Selain itu, BPRSW juga melakukan monitoring alumni melalui kegiatan seperti kunjungan rumah (*home visit*), kunjungan kerja, dan temu alumni. Tujuan dari kegiatan ini tidak hanya memantau pertumbuhan alumni, namun juga memberikan dukungan berkelanjutan seperti bimbingan pemantauan manajemen dan pemanfaatan bantuan stimulan. Dengan pendekatan ini, BPRSW bertujuan untuk membantu alumni dalam mempertahankan dan meningkatkan perilaku positif yang mereka kembangkan selama masa rehabilitasi, sehingga memungkinkan mereka untuk berhasil beradaptasi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

Menurut peneliti, tahap terminasi yang dilakukan BPRSW Yogyakarta mengikuti prosedur Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Terminasi atau pengakhiran masa layanan penerima manfaat dilakukan setelah melalui serangkaian prosedur dan peraturan, karena pemberhentian merupakan bagian penting dalam tahapan rehabilitasi, maka selain mengacu pada ketentuan yang berlaku, pemberhentian juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas lainnya yang belum menerima manfaat.

#### **b. Analisa Metode dan Teknik Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta**

Berdasarkan metode dan teknik pemberdayaan perempuan yang diberikan oleh BPRSW Yogyakarta terhadap klien sudah cukup relevan dan efektif. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dialami perempuan, seperti korban perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga, BPRSW telah menerapkan pendekatan yang mencakup bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan. Di samping metode ini, bimbingan konseling juga cukup efektif dalam membantu klien mengatasi trauma psikologis, khususnya bagi mereka yang telah menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditandai dengan klien yang sudah merasa lebih aman karena mereka telah menceritakan dan berkonsultasi kepada konselor untuk meredakan rasa cemas dan emosi mereka. Setelah adanya konseling ini klien merasa adanya ketenangan setelah diberi solusi, masukan, dan motivasi oleh konselor. Konseling ini dirancang untuk memberikan dukungan emosional dan membantu klien membangun kepercayaan diri mereka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dermawan (2016) bahwasannya dalam memberdayakan perempuan, mereka harus dibekali dan diberi berbagai kegiatan. Kegiatan ini sudah dilakukan BPRSW dalam memberdayakan klien dengan memberikan pembelajaran dikelas, bimbingan keterampilan, bimbingan seni seperti karawitan dan tari. Pada hari jumat, klien juga harus ada

kegiatan seperti membersihkan asrama, halaman balai, dan berkebun. Tidak hanya itu, ada beberapa klien yang termasuk mahasiswa di kampus ternama di Jawa Tengah, akan tetapi dengan kondisi beliau yang sangat memprihatinkan sehingga membuat klien harus pindah ke BPRSW Yogyakarta. Dari sini dapat dilihat, bahwa BPRSW tidak melarang kliennya untuk mengejar pendidikan bahkan BPRSW memberikan kesempatan untuk klien agar mampu mengejar pendidikannya, karena menurut peneliti jika seorang klien mempunyai potensi dan antusias yang tinggi untuk belajar harus diberi kesempatan kepada mereka, dengan memberi mereka fasilitator dalam pembelajaran seperti adanya seorang guru guna untuk mengembangkan dan mendorong perkembangan klien.

**c. Analisa Materi Pemberdayaan Perempuan di BPRSW Yogyakarta**

Terkait dengan analisa materi tentang pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta, BPRSW memberikan kepada para klien serangkaian kegiatan yang tidak hanya dirancang untuk mengisi waktu, tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berharga. Hal ini menunjukkan strategi yang efektif untuk memberdayakan perempuan guna mencegah kebosanan yang dapat menghambat proses rehabilitasi. Dedikasi BPRSW untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klien ditunjukkan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan kelas, seperti belajar bahasa Jawa, bahasa Inggris, budaya, motivasi, dan kesehatan mental. Pembelajaran bahasa Jawa guna untuk menginternalisasi budaya jawa kepada klien, sedangkan bahasa Inggris untuk membekali klien apabila dia bekerja diluar negeri.

Pelatihan dalam olah pangan, membuat batik, salon, dan menjahit tidak hanya memperluas peluang pekerjaan klien tetapi juga memberikan pengetahuan baru. BPRSW membantu klien menjadi lebih mandiri secara finansial dengan memberikan keterampilan yang relevan berdasarkan kebutuhan pasar. Hal ini ditandai dengan alumni BPRSW yang sudah mengalami hal tersebut, dimana alumni BPRSW telah membangun usaha dari skill, potensi dan kemampuan yang dia punya dibidang salon, bahkan sampai

saat ini alumni tersebut menjadi instruktur di keterampilan salon/tata rias BPRSW Yogyakarta.

Menurut hemat peneliti, materi ini sudah sangat relevan dan efektif karena dalam pemberdayaan perempuan yang paling diutamakan adalah pendidikannya, pemahaman akan keterampilan yang dikuasai dan kesadaran hukum untuk membela perempuan dari kekerasan. Dengan memberikan akses penuh terhadap pendidikan, pekerjaan dan sumber daya lainnya merupakan hal yang harus ada pada diri perempuan. Sesuai dengan pendapat Risha Erika (2022) bahwa masyarakat harus mampu memberi perempuan akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya sehingga mereka dapat berorganisasi dan memperoleh kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah dan berperan dalam mengembangkan keterampilan dan konsep diri mereka.

Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta telah merencanakan pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta. Setelah itu, program yang dimaksud benar-benar terlaksana dari tahap awal hingga akhir. Berdasarkan analisis peneliti, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta adalah dari faktor internal, kondisi klien yang terbatas kemampuannya dan sikap yang kurang sopan. Faktor eksternalnya adalah kurangnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, dan ketersediaan lintas sektor untuk penanganan permasalahan wanita di BPRSW Yogyakarta. Sedangkan faktor pendukung dalam proses pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta adalah dari faktor internal adanya motivasi yang jelas untuk menambah kepercayaan diri klien, kondisi klien yang sudah bersemangat dan sudah menerima dirinya sendiri untuk bisa maju dan berkembang. Faktor eksternalnya adalah tersedianya relawan sosial yang membantu BPRSW dalam menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat, baik kaitannya dengan perlindungan maupun rehabilitasi.

## **B. Analisis Hasil Pemberdayaan Perempuan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta**

Analisis hasil pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta mencakup beberapa langkah penting yang menunjukkan proses dan dampak positifnya terhadap klien. Proses pemberdayaan diawali dengan penyadaran melalui motivasi dan asesmen awal, dilanjutkan dengan rehabilitasi yang meliputi pembelajaran keterampilan mental, fisik, dan sosial serta keterampilan khusus seperti menjahit, olahan pangan, membuat, dan salon/tata rias. Rehabilitasi dilakukan agar klien dapat berinteraksi dengan masyarakat dan mempraktikkan keterampilan yang telah mereka pelajari selama di BPRSW Yogyakarta. Bimbingan lebih lanjut juga akan diberikan untuk mendukung klien mempertahankan perilaku positif dan meningkatkan keterampilan profesionalnya setelah keluar dari BPRSW. Tahap terakhir adalah terminasi, dimana BPRSW menegaskan bahwa klien siap mandiri dan tidak memerlukan intervensi langsung.

Pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta memberikan dampak positif melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis dan rehabilitasi sosial. Program ini membantu klien dalam meningkatkan kemandirian finansial, kesadaran akan hak-hak perempuan, dan kualitas hidup. Namun, dalam implementasinya pasti ada tantangan, termasuk masalah sosial terhadap perempuan yang pernah mengalami kekerasan, terbatasnya anggaran dan sumber daya, serta kesulitan mempertahankan keberlanjutan hasil program tanpa dukungan lebih lanjut. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan upaya strategis seperti membangun kemitraan dengan pihak swasta, meningkatkan pemantauan dan evaluasi program, serta mengedukasi masyarakat tentang pengurangan masalah sosial.

Dalam aspek partisipasi kegiatan keterampilan, perempuan tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tapi juga meningkatkan produktifitas secara keseluruhan. Berdasarkan analisa peneliti, keberhasilan pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta dapat diketahui melalui indikator keluaran (*output indicator*), indikator hasil (*outcome indicator*) dan indikator dampak (*impact indicator*):

a. Indikator keluaran (*output indicator*). BPRSW Yogyakarta telah menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan, hal ini ditandai dengan adanya berbagai keterampilan, kegiatan seni, dan pembelajaran.

b. Indikator hasil (*outcome indicator*). Dengan adanya berbagai program kegiatan yang diberikan BPRSW Yogyakarta terhadap klien, telah menghasilkan klien yang mandiri dan sudah meningkatnya rasa percaya diri mereka hal ini dilakukan agar klien mampu memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian permasalahannya dan peningkatan kemampuan yang dimilikinya saat ini.

c. Indikator dampak (*impact indicator*). Dapat diketahui bahwa dampak dari bimbingan yang dilakukan di BPRSW telah memberikan dampak yang baik, yakni dengan adanya klien yang membangun usaha pasca terminasi, ini dapat memberikan peluang kerja bagi perempuan lainnya. Bagi klien yang masih berada di BPRSW Yogyakarta juga memberikan dampak yang baik, dengan berkembangnya pengetahuan klien terhadap keterampilan dan motivasi klien akan berwirausaha.

Peningkatan secara signifikan dalam keterampilan dan motivasi berwirausaha, tercermin dari peningkatan jumlah perempuan yang mampu mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Implementasi program ini didukung oleh cakupan wilayah yang luas, kemitraan dengan berbagai instansi, dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kemajuan klien setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan di BPRSW berhasil mencapai dampak positif yang berkelanjutan bagi perempuan yang mempunyai masalah sosial.

Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan mental dan sosial klien, yang sangat penting dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Dengan adanya bimbingan keterampilan, sosial, dan mental telah tercapainya motivasi bagi klien untuk berwirausaha, serta pemahaman klien atas manajemen waktu dan diri mereka. Dampak dari pemberdayaan ini mulai adanya peningkatan kemandirian ekonomi hingga peningkatan kualitas hidup klien dan keluarganya. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki akses dan keterampilan profesional kini dapat memulai usaha kecil-kecilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesadaran perempuan akan hak-haknya juga

meningkat dan mereka mampu melindungi diri dari kekerasan dan eksploitasi di masa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk melindungi diri mereka. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan. Dalam pemberdayaan, perlu adanya pendampingan secara terus menerus, hal ini dilakukan agar program yang rencanakan lebih efektif. BPRSW Yogyakarta merupakan salah satu agen pemberdaya yang berperan sebagai penggerak dan pembimbing terhadap korban kekerasan perempuan di Yogyakarta. BPRSW Yogyakarta adalah lembaga yang menangani permasalahan perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah naungan Dinas Sosial Yogyakarta. Proses pemberdayaan perempuan di BPRSW dilakukan dengan 5 (lima) tahapan, metode dan materi yang diberikan selama berada di BPRSW Yogyakarta. Pada proses tahapan tersebut meliputi (1) Tahap Sosialisasi, Penjangkauan, dan Penerimaan Klien (2) Tahap Rehabilitasi Sosial (3) Tahap Resosialisasi (4) Tahap Bimbingan Lanjut (5) Tahap Terminasi.

Metode pemberdayaan terhadap perempuan dalam pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta adalah berbeda-beda, akan tetapi secara umum pendekatan konseling dan bimbingan keterampilan merupakan metode utama dalam memulihkan kepribadian klien sehingga muncul keberfungsian yang optimal pada diri klien. Dari pendekatan konseling kepada klien guna untuk memahami masalah klien serta menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, BPRSW memberikan layanan latihan keterampilan terhadap perempuan, hal ini dilakukan untuk mendorong dan membantu klien dalam meningkatkan ekonomi mereka. Materi dalam pemberdayaan perempuan di BPRSW Yogyakarta dilakukan dengan pembelajaran dikelas seperti materi tentang kesehatan mental, keagamaan, dan belajar bahasa jawa dan inggris. Selain itu, bimbingan seni juga merupakan kegiatan dalam proses pemberdayaan di BPRSW seperti karawitan dan tari.

Hasil pemberdayaan perempuan di BPRW Yogyakarta dapat dilihat dari aspek ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Dalam aspek ekonomi, banyak perempuan atau klien yang sebelumnya bergantung pada orang lain namun kini mereka mampu mencari

pekerjaan yang layak bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dikarenakan adanya program bimbingan keterampilan selama mereka berada di BPRSW Yogyakarta. Dalam aspek peningkatan kualitas hidup, klien merasa percaya diri, perubahan sikap dan perilaku klien serta berani untuk berpartisipasi dengan masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini bahwa Pemberdayaan Perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, sudah cukup relevan dan baik, akan tetapi ada beberapa saran yang peneliti ingin sampaikan, baik itu dari keluhan kasus PPKS yang ada di BPRSW maupun dari peneliti sendiri, antara lain:

1. Diharapkan pihak BPRSW lebih perhatian lagi terhadap klien yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan, dengan memberikan penyadaran dan motivasi secara mendalam agar mereka bisa lebih taat dan patuh terhadap peraturan dan program yang ada di BPRSW.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan masyarakat pasca rehabilitasi di BPRSW, agar perilaku dan kasus mereka tidak terulang lagi.
3. Diharapkan kepada Dinas Sosial DIY, untuk mendukung BPRSW dengan memberikan dana tambahan ataupun sumbangan karena masih banyak kebutuhan yang harus diberikan kepada klien.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengkaruniai kesehatan, anugerah, dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kemudahan setelah kesulitan, kecuali atas kehendak Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca, agar skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

### Daftar Pustaka

- Admin. (2017, Agustus). *Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)*. Retrieved from Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Admin. (2023, Juli). *Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak* . Retrieved from Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan.
- Administrator. (2023, Januari). *Perlindungan Perempuan pada saat berhadapan dengan hukum*. Retrieved from DP3AK: <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link>
- Al Abbasy, K. (2021). Pemberdayaan Perempuan melalui program Batik tulis. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020, Desember). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*(Vol. 5, No. 2).
- Arifin, B., & Santoso, L. (2016, Desember). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8*.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum (The Genre of Feminism and the Theory of Gender Equality in Law). *Journal of gender and children studies, Vol. 1 No. 1*.
- Bappeda DIY. (2018). *Indikator Kinerja Pemda Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat*. Retrieved from Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta: [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_indikator\\_kinerja\\_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat#:~:text=Pemberdayaan%20perempuan%20adalah%20upaya%20pemampuan,memecahkan%20masalah%2C%20sehingga%20mampu%20membangun](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat#:~:text=Pemberdayaan%20perempuan%20adalah%20upaya%20pemampuan,memecahkan%20masalah%2C%20sehingga%20mampu%20membangun)
- Barus, R. (2015). Pemberdayaan Perempuan melalui Media Sosial. *Jurnal Simbolika, Vol. 1 No. 2*.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi terhadap UKM Cirebon Home Made). *Jurnal Ilmiah Nasional, Vol. 2 No. 1*.
- Dermawan, A. M. (2016). Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi kreatif. *Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Dinardo, D. (2017). Peran Pekerja Sosial dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vo. 1 No. 2*.
- Efendi, M. Y., & Endah, R. (2022). *Metode Pemberdayaan Masyarakat*. Polije Press.
- Elmiani. (2021). Implementasi Program Bimbingan Keterampilan Menjahit di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. *Journal of Society and Continuing Education, Vol. 2 No. 3*.

- Equivalen, A. (2018). Resosialisasi Anak Jalanan di Panti Sosial (Studi Kasus Panti Sosial Asuhan Anak putra Utama 4, Jakarta Barat. *Skripsi Universitas Negeri Jakarta*.
- Fitrina, N. R. (2016). Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan). *Skripsi Universitas Negeri Semarang*.
- Ghoni, A., Soebahar, M., & Muhajarah, K. (2020). Protection Model Concerning Children Dealing With The Law in Central Java, Indonesia. In H. H. Kusuma, N. Ahmad, B. Bukhori, & R. Rahim, *Proceeding of the first International Conference on Islamic History and Civilazation*.
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, Vol. 1 No. 2*.
- Habibullah. (2017). Perlindungan Perempuan Komprehensif di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 3 No. 1*.
- Handayani, S. (2019). Strategi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dalam bertahan hidup di Kabupaten Sleman. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.
- Ihsan, M. A. (2019). Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif. *Jurnal Studi Gender, Vol. 11. No 1*.
- Indonesia, P. (2024). *Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi*.
- Jamaluddin, A. N. (2016). Dasar-dasar Patologi Sosial. In A. N. Jamaluddin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*. CV. Pustaka Setia.
- Kodariyah, S. N. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Argowisata Kampung Sayur di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.
- Marmoah, S. (2014). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. Sleman, DIY: CV. Budi Utama.
- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 4 No. 2*.
- Musdhalifah, & Sari, R. M. (2024). Struggle R.A Kartini: Pemikiran dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Teori Fungsionalisme Struktural. *Journal of Science and Social Research, Vol. 7 No. 3*.
- Mustafirin, Riyadi, A., & Saputri, J. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Berkah Jaya Plastindo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Alijtimaiyyah, Vol. 7 No. 2*.

- Nadia. (2022, Desember). *Pemberdayaan Perempuan untuk kesetaraan*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Namira, I. (2023). Pemberdayaan perempuan Melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia*. (P. Pelajar, Editor)
- Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal IAIN Bone*.
- Pamungkas, A. (2020). *Rehabilitasi Sosial*. Retrieved from <https://fuad.iain-palangkaraya.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MATERI-MATA-KULIAH-REHABILITASI-SOSIAL.pdf>
- Pane, R. M. (2017). Terminasi hubungan konseling. *Jurnal Hikmah, Vol. 11 No. 2*.
- Partini, & Suyatna, H. (n.d.). Masalah-masalah sosial. *Modul 1*.
- Pratiknyo, D. A. (2022, Maret). *Memahami Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial*. Retrieved from Dinas Sosial Kota Magelang: <http://dinsos.magelangkota.go.id/memahami-standar-rehabilitasi-sosial-dengan-pendekatan-profesi-pekerjaan-sosial/>
- Riyadi, A., Karim, A., & Yuliani, T. (2024). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA: STUDI PADA WISATA BLEDUG KUWU DI DESA KUWU KECAMATAN KERADENAN KABUPATEN GROBOGAN. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1*.
- Saputra, A. (2018). Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.
- Saputra, H. (2020). Pemberdayaan Perempuan melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) (Studi pada kelompok PKK di Kelurahan Lorok Pakjo Palembang). *Skripsi Universitas Sriwijaya*.
- Saugi, W., & Sumarno. (2015). Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 2 No. 2, 226-238*.
- Septyawati, L., & Filza, M. F. (2018). Pemberdayaan Perempuan Marjinal Melalui Program Kewirausahaan berbasis bisnis online di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Seminar hasil pengabdian masyarakat, Universitas AMIKOM Yogyakarta*.
- Sugitanata, A., Hasan, F., Kurniawan, M., & Aminah, S. (2024). Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Struktualisme dan Implikasinya. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 12 No. 1, 1-13*.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

- Sulistiyani, S. (2022). *Pemberdayaan Perempuan di Masyarakat: Tujuan, Strategi, dan Program*. Retrieved from Insan Bumi Mandiri: <https://blog.insanbumimandiri.org/pemberdayaan-perempuan-di-masyarakat>.
- Surianti, & Wahyuni, S. (2023). Pendampingan Konseling individu terhadap PPKS di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Sidoarum, Sleman Yogyakarta. *Mimbar: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, Vol. 9*.
- Widiasih, R. (n.d.). Keberfungsian Sosial Alumni Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta (BPRSW) penerima program sertifikasi tahun 2013-2015. *Jurnal Pendidikan*.
- Yuniarti, R. (2017). Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.

## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana hasil dari pemberdayaan perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta?

#### B. Pertanyaan untuk Bapak Widiyanto selaku Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Berapa jumlah kasus pada saat ini?

A: Jenis kasus ada 5:

1. Wanita rawan sosial ekonomi meliputi perempuan yang berada pada keluarga yang tidak mampu, yang kondisinya mungkin putus sekolah, tidak bisa meneruskan sekolah, sehingga kalo tidak disentuh dengan kegiatan” di balai maka akan rentan kena masalah sosial dan ekonomi.
2. Korban tindak kekerasan, terdiri dari berbagai kasus yakni fisik dan psikis, korban perlakuan sah dalam keluarga contoh diperkosa atau sering disebut dengan kehamilan tidak dikehendaki (kekerasan seksual), akan menjadi double penyandang masalahnya. Jadi, secara fisik dia kena tindakan fisik juga secara psikis adanya tekanan mental karena diperkosa harga dirinya rendah dan lain sebagainya, sehingga itu perlu perlindungan dan rehabilitasi sosial di balai ini
3. Wanita tuna susila, wanita yang menjajakan diri untuk melayani pria hidung belang dengan imbalan baik berupa uang maupun barang atau pun pelayanan yang lain ini sudah pilihan dia untuk melakukan hal ini. Tapi pilihan ini juga mungkin dilatar belakangi dengan kondisi keluarga yang tidak mampu, tidak mempunyai skill, dipaksa atau terpaksa untuk melakukan hal itu sehingga lama kelamaan menjadi habit, perilaku atau tingkah laku mungkin dia bekerja anggapan dia enak dan mendapatkan uang yang banyak, sehingga menjadi habit yang selalu dia lakukan

4. Korban Trafficking (perdagangan orang), dengan berbagai dari biasanya yang sedang marak itu perekrutan tenaga kerja oleh seseorang atau lembaga tetapi ternyata dipekerjakan atau dijual kepada orang lain, baik itu motifnya ekonomi maupun penipuan.

5. Pekerja migran bermasalah sosial, kita tau lapangan pekerjaan khususnya di Jogja itu tidak tersedia dilingkungan mereka, sehingga mereka menjadi pekerja migran pekerja yang berpindah dari alamatnya ke tempat kerja yang lain. Jika di Indonesia namanya pekerja migran domestic, tapi kebanyakan pekerja migran di Indonesia itu menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri. Ini kadang-kadang mereka berangkatnya ada yang legal dan illegal, ini menjadi kerentangan bagi mereka karena ditempat kerja itu juga berbagai tindakan kekerasan yang dialami, sehingga yang legal mungkin bisa ditangani oleh aparat pemerintah baik pemerintah dimana dia bekerja maupun pemerintah Indonesia. Tapi yang illegal ini biasanya pemerintah yang dimana dia bekerja itu menyalahkan karena berangkatnya sudah tidak legal dan itu harus kita tangani jika perlu penanganan di balai maka disinilah tempatnya, tapi kita memotivasi kepada keluarga supaya dia tertangani dikeluarga dan masyarakat.

2. Dari jumlah tersebut, yang sudah ditangani berapa orang?

A: Untuk tahun ini modelnya keluar masuk ya mbak, jadi tidak angkatan. Dimana ada kasus kemudian masuk dan kita dilarang menolak. Sampai bulan September ada 69 yang sudah ditangani dengan target penanganan kita sampe akhir 2024 ini adalah 70, kita masih punya waktu saya kira masih bisa terlampaui target 70 orang itu, tapi untuk penanganan hariannya daya tampungnyadan penganggarannya hanya untuk 50 orang termasuk anak yang dibawa kesini.

3. Bagaimana metode, materi, teknik, dan sumber biaya dalam pemberdayaan perempuan  
Di BPRSW Yogyakarta?

A: Sementara saya ceritakan dari awalnya, masuk k BPRSW ini pertama kita screening kondisinya seoerti apa, baik itu kesehatannya, psikologisnya, dari dimensi sosialnya, dan dari dimensi permasalahannya sendiri, itu di screening oleh mereka yang professional kalau kesehatan oleh dokter, pekerja sosial, konselor dan psikolog. Nantikan akan ditemukan kondisi PPKS itu. Kondisinya seperti apa, maka kalau dia perlu penanganan

traumatic itu ada wisma trauma center itu tempatnya disitu, dan selama di trauma center itu ada upaya perlindungan baik perlindungan akan hak-haknya, maupun perlindungan dari ancaman dari luar. Kita melakukan perlindungan selama 24 jam, setelah adanya perlindungan ada namanya rehabilitasi sosial, kita lakukan sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2017, rehabilitasi sosial sesuai dengan praktek pekerja sosial itu minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan, kurun waktu itu kita rehabilitasi fisik, mental, sosial, keagamaan, dan kita bekali dengan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan mereka, dengan harapan secara psikis mereka pulih kembali tidak ada traumatis, secara permasalahan dia bisa menyesuaikan diri dengan masalahnya dia paham dengan masalahnya dan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kita membantu disini untuk memberi itu semuanya, secara sosial dia fungsi sosialnya akan naik dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, ini sesuai dengan visi BPRSW adalah mewujudkan wanita yang bermartabat, berakhlak dan mandiri, pemberdayaan nya itu di mandirinya itu. Sumber biayanya dari APBD DIY, sesuai dengan pengusulan kita dan ketersediaan dana. Artinya, jika kita mengusulkan dana sekian banyaknya tetapi UPD di DIY itukan ada sekitar 34, mereka mengusulkan pendanaan semuanya sedangkan APBD DIY kan terbatas, makanya pembahasan anggaran itu mulai dari bulan maret sampe dengan penetapannya desember tahun sebelumnya, sehingga tahun selanjutnya kita melaksanakan sesuai dengan keputusan bulan desember itu namanya DPA terus diterjemahkan kedalam rencana kerja anggaran. Kita bagi kedalam aliran kas mulai januari melakukan apa sampe dseember sehingga itu akan tertata rapi pada permasalahan itu ada monev setiap 3 bulan sekali untuk menyelesaikan permasalahan” itu.

#### 4. Bagaimana evaluasi dalam penanganan pemberdayaan perempuan di BPRSW?

A: Evaluasi eksternal setiap 3 bulan sekali ada rapat koordinasi pengendalian (rakorda), jadi apa yang sudah kita lakukan dilihat oleh APD terutama BAPPEDA, nanti dinilai dan dievaluasi preprogram, perkegiatan, per sub kegiatan, terus ada inovasi atau tidak, bekerja sama dengan stakeholder atau gak dan lain sebagainya. Kalau evaluasi internalnya, setiap hari senin ada rapat apel zoom meeting yang dipimpin oleh kepala dinas. Itu akan terpapar kekurangan, kelebihan, kelemahan, sesuatu yang bisa dikembangkan lagi dan lain sebagainya, baik itu keuangan, fisik, maupun inovasi-inovasi yang kita lakukan.

5. Bagaimana hubungan BPRSW dengan klien yang sudah alumni dari BPRSW tersebut?

A: Hubungan masih saling memberikan informasi, kita ada monitoring dan evaluasi pasca terminasi (penghentian pelayanan dibalai). Kita kembalikan kepada keluarga, jika tidak ada keluarga kita carikkan tempat kerja dan sebagainya. Hasil monitoring itu akan diperoleh data kalo mereka sudah mandiri, sudah bekerja itu memang tujuan kami, yang belum kita link kan dengan berbagai sumber yang ada diluaran sana, misalnya basnaz, permensos, dan CSR. Walaupun mereka sudah terverifikasi atau belum itu tetap kita monitoring dan evaluasi sehingga walaupun sudah alumni masih ada hubungan dengan kami. Karena untuk mengukur kemandirian itu tidak sebentar, kadang-kadang sekarang setelah lulus dia bekerja, mungkin saja di PHK atau diputus hubungan kerjanya dan nganggur lagi.

6. Apa faktor pendukung dalam proses pemberdayaan perempuan di BPRSW?

A: Faktor pendukung internal dan eksternal, internal jelas motivasi, kondisi PPKS yang sudah bersemangat dan sudah sens terhadap dirinya sendiri untuk bisa maju dan berkembang, itu faktor pencetus paling bisa mensukseskan dia, kalo dia tidak termotivasi pasti banyak yang kabur. Kemudian eksternal tersedianya relawan sosial, baik kaitannya dengan perlindungan maupun dengan rehabilitasi. Keberpihakan PEMDA DIY terhadap PPKS disini terkait dengan regulasi dan juga penganggaran.

7. Apa kendala atau hambatan yang muncul selama proses pemberdayaan perempuan di BPRSW?

A: Faktor penghambat nya ada 2 yakni internal dan eksternal. Internal sendiri itu motivasi atau kondisi PPKS yang terbatas bisa kemampuannya bisa kapasitasnya bisa juga sikap dan motivasinya. Eksternalnya adalah ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, dan ketersediaan lintas sektor untuk penanganan permasalahan wanita ini. Kalau yang internal kadang PPKS sendiri dalam keadaan double indicame artinya double jenis PPKS itu sendiri. Di sosial itu kana da 26 jenis PPKS, yang kita tangani ada 5, tapi kadang-kadang yang korban tindakan kekerasan dia pada kondisinya awalnya, itu sudah difabel trus terjadi tindakan kekerasan misalnya dia diperkosa dan lain sebagainya sehingga untuk pemberdayaan ini menjadi terbatas dan bermasalah. Misalnya juga ada PPKS yang ODGJ

dan sosialisasi mental itu menjadi hambatan didalam upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial, tidak bisa optimal, RM itu biasanya kaitannya dengan IQ. ODGJ itu kondisi yang tidak bisa sembuh, itu hanya pulih kalau nanti ada tracker atau pencetus dari kekambuhan dia maka down lagi kita upayakan pengobatan lagi dan seterusnya. Tapi semua kita perlakukan sama, artinya mereka juga mendapatkan hak-haknya disini dan kita kan dimotivasi untuk dilarang menolak, walaupun double indicame, tidak dilarang menolak, artinya kita terima dulu, kita screening dan asesmen nanti setelah selesai dari perlindungan untuk merehabilitasinya bisa dirujuk kepada lembaga yang lebih tepat.

8. Apa yang diharapkan kedepannya untuk memberdayakan perempuan dari tindakan kekerasan ataupun pelecehan?

A: Harapan kedepannya, kasus” terhadap perempuan semakin sedikit, artinya upaya-upaya sosialisasi, preventif terhadap permasalahan wanita ini secara masih harus dilakukan baik itu dalam pertemuan-pertemuan sampai dengan rekrut maupaun didalam media sosial, karena banyaknya permasalahan ini tidak lepas dari media sosial. Keberpihakan pemerintah daerah, pemerintah pusat itu lebih besar lagi terhadap upaya preventif maupun kuratif didalam penanganan wanita yang bermasalah. Semua stakeholder hendaknya saling memperkuat dalam penanganan masalah wanita ini sesuai dengan tujuan masing-masing jadi saling bersinergi.

C. Pertanyaan kepada Ibu Herawati selaku Pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Bagaimana mekanisme pemberdayaan perempuan di BPRSW?

A. Tahap awal ada pengenalan (Engagement), kemudian ada assessment, kemudian rencana intervensi dengan membuat rencana intervensi jangka pendek, rencana intervensi jangka menengah, dan intervensi jangka panjang. Setelah itu kita intervensi dengan program perlindungan dan program rehabilitasi. Setelah itu kita resosialisasi serta yang terakhir terminasi.

2. Bagaimana efektivitas dalam penanganan terhadap perempuan?

A: Karena banyak yang ikut terkiat, jadi banyak sekali yang menangani. Ini mempermudah kita dalam penanganan misal, ada kasus ini, ouh ini bekerja sama dengan polisi, kalau polisi sudah oke penanganannya, kemudian ada masalah anak-anak yang putus sekolah, kita libatkan guru-guru yang ada disekolah tempat si anak itu, jadi kita tidak hanya ada untuk PPA kita juga terlibat dengan puskesmas, tim kesehatan, dengan sekolah, jadi sangat efektif sekali dan penanganannya bisa cepat. Ada prioritas yang mana ditangani terlebih dahulu.

3. Apa yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan dalam hal penanganan dan pemberdayaan perempuan?

A: Yang perlu kita tingkatkan itu terutama kalo mereka berkarya, kita poser dulu perubahan perilakunya dulu aja karena walaupun mereka itu diberdayakan bagaimana kali perubahan dari dalam diri tidak bisa masih tetap sulit, jadi harus ada keinginan dan motivasi dari diri sendiri, ingi maju ingin ada perubahan, kalo masalah belajar keterampilan itu nomor dua dulu lah yang terutama perubahan sikap mental moral, sosial yang harus kita bentuk dulu, kalo itu sudah terbentuk insyaallah it tidak akan sulit untuk memberdayakan mereka. Yang penting ada perubahan perilakunya dulu.

4. Bagaimana strategi yang dilakukan BPRSW dalam menurunkan jumlah kekerasan/pelecehan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

A: Kita sekarang sudah bekerja sama dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, dulu kita fokus cuman kita yang fokus ke kita untuk menangani masalah korban tindak kekerasan, sekarang sudah ada upaya untuk bekerja sama dengan satuan-satuan, gerakan-gerakan yang ada di masyarakat, seperti SIKRAK (Satuan anti kekerasan) PPA ini juga gerakan yang menangani kekerasan. Sekarang banyak gerakan-gerakan yang menangani kekerasan, sekarang kita sudah mencoba bekerja sama kita kuatkan lagi, menjalin relasi, satu suara, kita tumbuhkan kerjasama kita lagi untuk tim korban kekerasan. Kita juga berinovasi dengan CELILAWAKOTIRIBON (Cepat lindungi layani wanita korban tindak kekerasan), bangkitkan kembali kalau dulu itu kita hanya sebagai penerima PPA, terus partisipasi yang berhak untuk mengatasi kekesaran ini kita sekarang bekerjasama tidak hanya menangani sendiri jadi kita kompak aja satu

suara, kalau ada apa-apa kita kerjasama. Jadi penanganan itu bisa bareng-bareng, kalau dulu kan sendiri-sendiri terus yang nangani lepas aja sekarang kita ada kolaborasi.

5. Siapa pelaku terhadap korban?

A: Pelakunya itu malah banyak dari lingkungan masyarakat sekitar, yang berdekatan dengan mereka sendiri. Malah yang dirumah juga ada, jadi pelakunya itu tidak jauh dari PPKS kita, dilingkungan masyarakat PPKS itu tinggal. Yang dilema itu gitu, seandainya nanti kita pulangkan jadi kita kerjasama itu disaat seperti ini, nanti disaat PPKS kita selesai rehab otomatis kembali ke lingkungan masyarakat jadi harus ada kerjasama dengan lingkungan masyarakat koordinasi, bagaimana nanti pengawasan dan kontrol sosialnya terhadap pelaku. Jadi, kita ada tindakan keras, selama ini pelaku itu berkeliaran bebas kebanyakan tidak ada tindakan apa-apa. Nanti setelah kita adanya tim ini semuanya bergerak, jadi pelaku kalo ada ditindak keras dan kontrol sosialnya itu diperketat, jadi selama ini kan berkeliaran, kalo perlu ada tindakan hukum juga dari masyarakat, sanksi sosialnya dikenakan (diterapkan) gitu. Selama ini kan gak ada sanksi sosial, apalagi penyandang disabilitas, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pembelaan juga tidak ada, terus pelaku seenaknya aja berkeliaran. Jadi, kita perlu ada saksi sosial dari masyarakat itu sendiri.

6. Apa hambatan yang dialami selama mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan di BPRSW?

A: Hambatannya itu yang paling utama karena perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh PPKS ini bersifat kamufase. Jadi, mereka itu seolah-olah disini sudah bagus karena mereka ingin segera keluar dari balai tidak mau merepotkan pelayanan. Tapi setelah kembali ke masyarakat, kembali ke lingkungan kembali lagi ke masalah pertama timbul lagi, jarang disini hampir berapa persen yang benar-bener berubah, maksudnya itu kebanyakan itu kembali ke habitatnya ke perilaku awal karena kurangnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar dan dari keluarga yang tidak kondusif tidak ada saling kerjasama, tidak ada edukasi, jadi otomatis mereka disini sudah bagus apalagi bersikap pura-pura baik ternyata dibelakang seperti yang tidak diinginkan, ditambah dengan lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, lingkungan juga tidak mendukung, yaudah tidak ada lagi perubahan itu.

7. Adakah tenggang waktu dalam memberikan pelayanan kepada korban, misal dalam beberapa hari korban harus bisa ditangani hingga masalahnya dianggap selesai dan bisa dikembalikan kepada keluarga?

A: PPKS disini kan adaptasi dulu, observasi lingkungan, misalnya tiga hari setelah kontak itu mereka dikasih kesempatan untuk observasi dulu untuk menentukan pilihannya, jadi minatnya kemana, jadi kita lihat dulu kalo memang udah sret nah baru bisa ikut memilih sesuai dengan keinginan itu. Kita juga membuat kontrak pelayanan, karena kan mereka pada demo, pada syok dengan situasi baru, jadi kalo kita datang gak langsung disodori.

8. Apa jenis pelayanan yang diberikan dalam memberikan pemberdayaan kepada perempuan?

A: Konseling, ada pelayanan psikososial, pendampingan keagamaan, keterampilan, layanan psikolog.

9. Apakah untuk pelaku tidak ada tindakan selain dilaporkan kasusnya, misal adanya konseling untuk pelaku?

A: Kalo pelakunya itu kan sudah kebanyakannya itu dipolisi, kita tidak mengurus masalah hukum, jadi kita lapor ke PPA atau perujuk kemudian yang memproses hukum itu dari PPA atau perujuk. Jadi yang proses biar PPA nya aja atau yang perujuk juga bisa. Mereka yang mengurus hukumnya.

D. Pertanyaan untuk korban di BPRSW Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta:

a. Klien D kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Apa penyebab terjadinya tindakan tersebut?

A: Kasus saya ini KDRT, bisa dibilang bullyan fisik sama pasangan, kejadian ini cukup lama, selama KDRT ini saya tahan aja, karena saya masih kepikiran buntu karena saya sadar dengan keadaan. Disini saya gak punya siapa-siapa, dan saat itu saya masih bingung mau cari kerja dimana. Sebenarnya kalo bisa diules-ules lebih dalam lagi, cari kerja tu gampang, tapi karena saya gak punya siapa-siapa, gak punya kendaraan. Seandainya saya mungkin pikiran saya tidak dibutakan dari rasa sayang saya, rasa

bodoh saya, gampang tertipu dengan yang namanya gak enakan. Tidak berani ngomong tidak, tapi sekarang sudah bisa melawan. Penyebabnya itu, kalo dari saya pribadi dari rasa cemburu yang berlebihan, terus saya gunakan logika, kenapa hal yang tidak biasa dia lakukan dan sehingga membuat rasa curiga saya itu semakin membesar, biasa yang kalo saya pegang hp selalu dimarahin (hpnya suami), terus dia kalo mandi selalu bawa hp padahal kalo dulunya gak, setelah itu kalo kerja banyak banget waktunya, padahal kita sudah bikin kesepakatan kalo kerja monggo, paling lama kalo malam mungkinlah bisa dibilang jam 10 atau 11 balik, besok paginya terserah mau berangkat jam berapa, mau subuh.

2. Tindakan apa yang anda lakukan setelah adanya kekerasan/pelecehan terjadi?

A: Pertama-tama sih cuman nahan tangis, berdoa sama Allah. Dan saya itu jarang banget keluar rumah, saya tidak bisa hidup bersosialisasi dengan lingkungan. Seakan-akan saya ini malu. Saya insecure dengan keadaan saya sendiri, saya mau negur orang itu saya malu, mau negur tetangga kos malu. Dulu ngekos bareng suami karena gak punya kontrakan juga jadi kalo mau negur tetangga kos saya malu karena bertengkar terus.

3. Apakah anda merasakan adanya perubahan terhadap diri anda sebelum dan setelah terjadinya tindakan tersebut?

A: Sebelum terjadinya KDRT ini saya senang, saya pernah dijadikan kayak seorang putri, saya tidak minta tapi dia yang ngasih. Terus dia tau kalo saya itu suka yang namanya healing. Setelah terjadinya KDRT ini saya bingung, saya ini tidak pernah kepikiran tentang hal ini, kok aku dulu gak pernah kepikiran harus begini iya, sehingga guwe jadi orang bodoh. Selama berada di BPRSW seminggu saya sudah merasakan ketenangan, walaupun saya ini sedih, nangis tapi saya merasakan ketenangan. Kayak ada perasaan lega. Sampe aku berfikir apa aku diguna-gunain kali ya.

4. Bagaimana anda menyikapi pandangan orang lain terhadap anda pada saat ini?

A: Orang kan gak pernah tau, Dina ini kenapa harus mengambil langkah ini, Dina ini mengapa harus mengambil hal seperti ini, pasti ada alasannya. Jadi kalo orang memandang saya itu kayak gini kayak gini hanya orang, tapi kalo orang disaat itu

bertanya ku jawab, tapi kan orang gak pernah mencoba bertanya, hanya menafsir menurut apa yang mereka lihat, setidaknya gini kalo memang kesalahan itu buruk, belum tentu tujuan saya keburuknya, jangan menvonis seseorang yang belum tentu dan tau tujuan orang itu.

5. Berapa lama waktu yang anda butuhkan sehingga anda mampu menerima diri anda secara terbuka?

A: Saya tidak bisa menghitung berapa lamanya, tapi kalo dibilang menerima yasudah memang saya gini. Inilah story kehidupan saya, saya belum bisa move on tapi saya masih belajar meyakinkan batin.

6. Siapa saja yang berpengaruh besar dalam hidup anda sehingga anda sudah mampu menerima diri anda?

A: Dewa (anak saya sendiri) yang membuat saya kuat sampe saat ini.

7. Bagaimana sikap BPRSW dalam menerima pengaduan laporan?

A: Bisa dibilang mungkin dari pihak BPRSW itu bingung, kasus saya ini mau ditaruh dimana, bagaimana keadaan anak saya nanti, mereka tidak akan sembarangan, karena saya tau yang dibilang dari lembaga ini, yang mengayomi benar-benar harus berbuah yang baik. Bagi saya mungkin BPRSW masih menunggu kemukjizatan.

8. Apakah tindakan yang diberikan BPRSW sudah sesuai dengan kebutuhan anda?

A: Mau dibilang kebutuhan pastinya harus bersyukur sudah, karena sudah dikasih tempat tinggal, terlindung dari panas, kelaparan, hujan, udah ngasih susu, pampers, terus saya bisa mandi, bisa nyuci, walaupun tidak sepenuhnya bagi saya itu sudah terpenuhi. Dulu pernah ada pimpinan yang dulu sampe ngasih uang jajan sama PPKS nya, tapi sekarang gak. Mungkin yang dulu itu ada hal yang ingin diamankan. Sekarang kalo mau diamankan barang-barang pada naik, sedangkan pemasukan secukupnya aja.

9. Layanan rehabilitasi apa yang sudah anda dapatkan?

A: Selain dari keterampilan, saya punya skill itu pembelajarn mental. Instruktur dari pelajaran, sehingga saya bisa nanamkan pada diri saya sekarang yang ini.

b. Klien W kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Apa penyebab terjadinya tindakan tersebut?

A: Dia kayak mabuk, pergaulannya, kayak dari omongan teman-temannya sih. Soalnya dia kan terpengaruh temannya.

2. Tindakan apa yang anda lakukan setelah adanya kekerasan/pelecehan terjadi?

A: Awalnya itu ragu mau ngelaporin tapi pas udah parah banget, pagi-pagi langsung otw laporin, langsung ke Polres. Kan setelah KDRT itu dia nyuruh aku pergi, terus hp semua, dompet ditinggal jangan dibawa, pokoknya kalo dia udah pulang aku disuruh pergi kemana aja, yaudah pas pergi itu aku kesempatan langsung aja aku ke polres. Itu langsung sambil nangis-nangis, sambil muntah-muntah disitu, mana posisi aku gak tau kalo lagi hamil akhirnya selama beberapa bulan disini aku keguguran.

3. Apa saja yang anda alami dalam kehidupan sehari-hari setelah terjadinya kekerasan/pelecehan?

A: Awalnya kayak tidur susah, makan susah, pikiran kemana-mana, stress, panik. Setelah dari Polres kan aku langsung ke PPA, dari PPA kan kayak ngurus visum segala macam itu, kalo keluar tapi kayak masih takut dan panic.

4. Apakah anda merasakan adanya perubahan terhadap diri anda sebelum dan setelah terjadinya tindakan tersebut?

A: Disini sebenarnya sudah mulai tenang, udah mulai lupain tapi walaupun lagi sendiri pasti terlintas, teringat gitu, kalo cuman sendiri kayak merasa gak berharga dan gak dihargai.

5. Bagaimana anda menyikapi pandangan orang lain terhadap anda pada saat ini?

A: Kalo aku tipe orang yang bodo amat, udah kalo misal dia cerita aku, aku kasih paham, misalnya dia nyeritain aku jelek, yaudah tak tunjukin aku jelek gitu, biar mereka puas, biarin aja mereka omongin apa mereka juga gak tau. Jadi aku gak bakal kayak mikirin sampe stress

6. Berapa lama waktu yang anda butuhkan sehingga anda mampu menerima diri anda secara terbuka?

A: Sekarang aja belum menerima, kayak keadaan ku itu kok gini, gak nyangka aja

7. Siapa saja yang berpengaruh besar dalam hidup anda sehingga anda sudah mampu menerima diri anda?

A: Anak saya, orang tua saya masih ada, saudara juga masih. Mereka mendukung dan mensupport aku, orang tua aku mendukung semua keputusan anaknya.

8. Bagaimana sikap BPRSW dalam menerima pengaduan laporan?

A: Sudah cukup, mungkin kalo fasilitasnya sudah oke, sebenarnya juga menurut aku bagus, cuman karena akunya yang gak terbiasa aja

9. Apakah tindakan yang diberikan BPRSW sudah sesuai dengan kebutuhan anda?

A: Sesuai, kalo pihak sini maunya yang terbaik, cuman karena dari akunya aja yang kayak pengen sepat selesai

10. Layanan rehabilitasi apa yang sudah anda dapatkan?

A: Banyak sih yang sudah diberikan, aku kalo dirumah cuman turan doang. Jadi kayak dirumah cuman kebanyakan makan tidur dan disini banyak kegiatan dan hidup lebih sehat, dan bisa melupakan masalah juga.

c. Klien T kasus Perdagangan Manusia (*Human Traffcking*)

1. Apa penyebab terjadinya tindakan tersebut?

A: Dijual karo mbokku (Ibu tiri) kalo ibu kandung aku gak pernah ketemu, dan aku langsung dijual, gak tau penyebabnya. Aku dijual dengan orang, sudah berkali-kali. Aku diiclik, dimasukin, dicipok, dipegang. Pernah sampe hamil tapi keguguran. Tapi aku pernah tes DNA itu bapak nya itu Ibnu (Koncoku dewe), dan kemungkinan dengan si Ibnu. Orang tua aku juga gak tau kalo aku hamil, setelah iclik itu aku kabur dari rumah 2 sampe 3 bulan, ora balik-balik dan itu aku dirumah Ibnu (rumah koncoku).

2. Tindakan apa yang anda lakukan setelah adanya kekerasan/pelecehan terjadi?

A: Aku mabuk-mabukan, terus nyabu, ngepil, ngerokok, begal, klitih wes tak lakoni. Dimana aja itu aku lakukan.

3. Apa saja yang anda alami dalam kehidupan sehari-hari setelah terjadinya kekerasan/pelecehan?

A: Depresi, kecewa, stress, putus asa. Putus as aku ini sampe nyaro obat deposit pokoknya obat sing go mate dewe, aku searching soale ndek google. Pernah sampe minum pembersih itu kayak vixal, terus tak minum gak papa, palingan pingsan tok uwes. Terus minum sabun cair, berharap aku mati iya Allah aku mati sampe nangis-nangis berharap mati tapi gak mati-mati heran aku ki.

4. Apakah anda merasakan adanya perubahan terhadap diri anda sebelum dan setelah terjadinya tindakan tersebut?

A: Sebelumnya aku ki kayak orangnya gak suka banyak ngomong, gak emosian, gampang banget bercanda cuman kan kalo sekarang udah beda, kayak rada emosian, yang dulunya juga gak pernah ngomong kasar saiki sering ngomong kasar.

5. Bagaimana anda menyikapi pandangan orang lain terhadap anda pada saat ini?

A: Tak ajak gelut, RT aja tak ajak berantam kok depan rumah ku. Dia ni ngomong masih kecil kok udah open BO, ohh bajingan koe ki ratrimo opo piye, meh gelut mbek aku opo piye, tak geret disitu langsung kedepan rumah, tak lempar langsung pake batu, kepalanya tak tendang, tak injek perut e ben mati-mati neng kono, aku ki berusaha go menetralkan emosiku tapi gak iso dee ki nyocot wae.

6. Berapa lama waktu yang anda butuhkan sehingga anda mampu menerima diri anda secara terbuka?

A: Aku belum bisa menerima diriku kayak gini, aku pengen banget kembali ke aku yang dulu, yang introvert. Tapi aku udah gak percaya bakal balik kayak dulu lagi.

7. Siapa saja yang berpengaruh besar dalam hidup anda sehingga anda sudah mampu menerima diri anda?

A: Nenek aku, kayak nasehat nyemangati hidupku, ngasih semangat, kalo aku berbuat masalah pasti selalu dinasehati, nasehat baik-baik, secara halus tidak pernah kasar.

8. Bagaimana sikap BPRSW dalam menerima pengaduan laporan?

A: Ora direspon, pertama itu aku dari Polda terus ke Polres Bantul, habis dari Polres Bantul dilempar ke Polresta, dari Polresta dilempar lagi ke PPA.

9. Apakah tindakan yang diberikan BPRSW sudah sesuai dengan kebutuhan anda?

A: Belum sesuai. Yang ku butuhkan ki psikiater

10. Layanan rehabilitasi apa yang sudah anda dapatkan?

A: Gak ada layanan yang bisa aku terima, karena sampe sekarang aja aku sering bikin ulah disini.

d.Klien K kasus Perdagangan Manusia (*Human Traffcking*)

1. Apa penyebab terjadinya tindakan tersebut?

A: Jadikan aku tuh pernah pelecehan seksual, terus habis itu ayah ku kan tau, awalnya gak terima to, habis itu mau dilanjutin ke yang bertanggung jawab habis itu to mbak disuruh visum benar-benar ada bekas luka. Setelah divisum aku itu dirumah terus gak taunya itu ayah tu kayak diajak perdamain antara dikasih kepolisi atau berdamai. Ayahku minta damai aja, terus dimintai uang, janjinya tuh dikasih uang 50 juta tappi yang dikasih itu ternyata cuman 20 juta, disitu ternyata orangnya itu kabur. Dari situ mulai aku dijual sama ayahku. Udah sering dan aku gak kenal mereka.

2. Tindakan apa yang anda lakukan setelah adanya kekerasan/pelecehan terjadi?

A: Aku kabur-kaburan kerumah teman-temanku, tak lampiaskan minum, ngepil, dugem juga pernah.

3. Apa saja yang anda alami dalam kehidupan sehari-hari setelah terjadinya kekerasan/pelecehan?

A: Kayak orang gila mbak aku ki, sikapku udah gak karuan, aku tuh sensitif, terus pengen sih rasanya tuh marah-marah, intinya udah kayak orang depresi mbak.

4. Apakah anda merasakan adanya perubahan terhadap diri anda sebelum dan setelah terjadinya tindakan tersebut?

A: Dulu aku tuh periang, orangnya gak sensitive, terus intinya bahagia banget, gak pernah kepikir-pikiran, setelah kejadian itu aku kayak gini iya kayak orang depresi, dan aku gak percaya lagi dengan orang-rang. Aku hanya percaya dengan ibuku sih, aku gak percaya dengan ayahku. Aku udah berusaha maafin orang tuaku, tapi aku tuh susah.

5. Bagaimana anda menyikapi pandangan orang lain terhadap anda pada saat ini?

A: Aku ki wes dicap lonte. Tapi aku ora perduli sih mbak, selagi dee ki ra ngontali aku wes ra peduli mbak.

6. Berapa lama waktu yang anda butuhkan sehingga anda mampu menerima diri anda secara terbuka?

A: Mboh mbak gak ngerti, udah lebih 4 tahun. Karena susah untuk menerima diri aku gini mbak, udah 4 tahun aku gak bisa nerima diriku gini mbak, malah nyalahin diri sendiri aku mbak. Mungkin dipandangan orang lain aku tuh gak salah, tapi aku merasa aku itu salah.

7. Siapa saja yang berpengaruh besar dalam hidup anda sehingga anda sudah mampu menerima diri anda?

A: Ibuku sama dia. Ada tiga orang, pacarku, ibuku, satu lagi orangnya disini, cowok pekerja disini, yang aku bilang udah kayak aku anggap kayal ayah aku sendiri.

8. Bagaimana sikap BPRSW dalam menerima pengaduan laporan?

A: Disalah-salahkan aku itu, disisi lain juga dibelain sih.

9. Apakah tindakan yang diberikan BPRSW sudah sesuai dengan kebutuhan anda?

A: Disini gak ada perlindungan, dilindungi raganya tok, gak dilindungi mentalnya, fisiknya, cuman raganya doang.

10. Layanan rehabilitasi apa yang sudah anda dapatkan?

A: Gak ada, menambah trauma, menambah masalah doang. Yang aku rasakan cuman itu, mengembakilan trauma ku, menurunkan mentalku, sama merusak mentalku.

e.Klien A kasus Kemiskinan

1. Apa penyebab terjadinya tindakan tersebut?

A: Keadaan posisi tinggal sendiri, orang tua gak ada, mau cari uang kemana, kerjaan juga kalo gak ada ijazah pasti susah, yang gak ada bawa pasti gak ada pekerjaan.

2. Tindakan apa yang anda lakukan setelah adanya kekerasan/pelecehan terjadi?

A: Berusaha bekerja, pernah menjadi penjaga warung/makanan.

3. Apa saja yang anda alami dalam kehidupan sehari-hari setelah terjadinya kekerasan/pelecehan?

A: Merasa capek pernah, ngeluh pernah, kenapa aku diposisi gini iya. Ingin banget posisi baik tapi gak berpihak ke saya. Kadang nyesel aku tuh dilahirkan.

4. Apakah anda merasakan adanya perubahan terhadap diri anda sebelum dan setelah terjadinya tindakan tersebut?

A: Makin gini-gini doang mbak, dari lahir udah gini saya, susah

5. Bagaimana anda menyikapi pandangan orang lain terhadap anda pada saat ini?

A: Ya biasa aja mbak, ditanggapin nanti malah emosi, makanya diemin aja.

6. Berapa lama waktu yang anda butuhkan sehingga anda mampu menerima diri anda secara terbuka?

A: Aku sudah menerima sih. Cuman butuh pekerjaan aja, pengen bahagiakan anak.

7. Siapa saja yang berpengaruh besar dalam hidup anda sehingga anda sudah mampu menerima diri anda?

A: Kakak saya, sering kesini juga, kalo yang lain gak tau.

8. Bagaimana sikap BPRSW dalam menerima pengaduan laporan?

A: Baik, diterima dengan baik

9. Apakah tindakan yang diberikan BPRSW sudah sesuai dengan kebutuhan anda?

A: Ada yang udah ada yang belum. Yang udahnya bikin keterampilan, dan yang belumnya itu susah untuk menjalani, karena malas dan bosan juga kok gini terus ya. Tapi enak diluar sih mbak, walaupun disini sudah sedikit terbantu

10. Layanan rehabilitasi apa yang sudah anda dapatkan?

A: Pelayanan makan, batik, bimbingan belajar diatas. Itu belum cukup bagi saya, karena saya butuh pekerjaan sih mbak. Saya pernah berfikir gini, kok manusia dikurung terus sih, kan manusia butuh kebebasan dan pekerjaan supaya bisa menghasilkan uang.

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

**Wawancara bersama Kepala Balai PRSW  
Bapak Widiyanto, S.Sos., MP.**



**Wawancara Bersama Pekerja Sosial  
Ibu Herawati, A.KS.**



**Wawancara Bersama Klien kasus KDRT**



**Wawancara bersama klien kasus KDRT**



**Wawancara bersama klien kasus  
Kemiskinan**



**Ngaji bersama klien**



**Wawancara bersama klien kasus  
Perdagangan Manusia**



**Wawancara bersama klien kasus  
Perdagangan Manusia**



**Wawancara bersama klien kasus  
Kemiskinan**



**Pembelajaran dikelas bersama seluruh  
klien**



## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

1. Nama : Simah Rezeki. R
2. NIM : 2101046035
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bener Kelipah, 01 Agustus 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jalan Simpang Jelobok-Pondok Baru-Desa Ramung  
Jaya Kec. Permata Kab. Bener Meriah Prov. Aceh

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Permata, Tahun 2008-2009
2. SD Negeri Ramung Jaya, Tahun 2009-2015
3. MTsS Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, Tahun 2015-2018
4. MAS Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, Tahun 2018-2021
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 20 Desember 2024



**Simah Rezeki. R**

NIM. 2101046035